

**ANALISIS KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM
PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN SIAK**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains**



Oleh:

**NAMA : SAID FAISAL NUGRAHA
NOMOR MAHASISWA : 177122052
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

ANALISIS KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA
DI KABUPATEN SIAK

TESIS

Oleh :

SAID FAISAL NUGRAHA
NPM: 177122052

TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Hj. Rosmayani, S. Sos, M.Si

Sekretaris



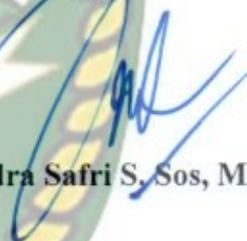
Lilis Suriani, S. Sos, M.Si

Anggota I



Dr. Zulhelmy, SE.,M.Si.AK

Anggota II



Indra Safri S. Sos, M.Si

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri., M.Ec

ANALISIS KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN
PARIWISATA DI KABUPATEN SIAK

TESIS

NAMA : SAID FAISAL NUGRAHA
NPM : 177122052
Bidang Kajian Utama : ADMINISTRASI PUBLIK

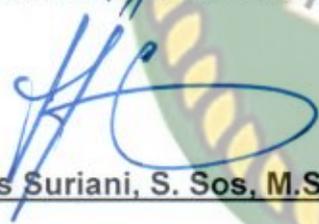
Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I
Pekanbaru, 14/Desember 2019



Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si

Pembimbing II
Pekanbaru, 14/Desember 2019



Lilis Suriani, S. Sos, M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Islam Riau



Lilis Suriani, S. Sos, M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian komprehensif tesis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Said Faisal Nugraha**
NPM : 177122052
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S.2)
Judul Penelitian : Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2019
Pembuat Pernyataan


METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Said Faisal Nugraha



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 311/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Said Faisal Nugraha
NPM : 177122052
Program Studi : Ilmu Administrasi

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 9 Desember 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi.
Magister Ilmu Administrasi

Lilis Sariyani, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 9 Desember 2019

Staf Perpustakaan

Sumardiono, S.IP



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

ANALISIS KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN SIAK by Said Faisal Nugraha



From Prodi. Ilmu Administrasi (Tesis)

- Processed on 09-Dec-2019 15:14 +08
- ID: 1230420246
- Word Count: 29433

Similarity Index
30%
Similarity by Source

Internet Sources:
30%
Publications:
1%
Student Papers:
8%



sources:

- 1 7% match (Internet from 18-Nov-2019)
https://siakkab.go.id/?wpfb_dl=2326
- 2 4% match (Internet from 18-Oct-2017)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/61278/Chapter%20I.pdf?isAllowed=y&sequence=5>
- 3 2% match (Internet from 25-Mar-2019)
<https://anzdoc.com/implementasi-kebijakan-pengembangan-pariwisata-sejarah-oleh-.html>
- 4 2% match (Internet from 04-Sep-2016)
<https://hafidzf.wordpress.com/2009/10/18/manajemen-dan-teori-organisasi/>
- 5 2% match (Internet from 30-May-2016)
<http://siakkab.go.id/visi-dan-misi/>
- 6 1% match (Internet from 01-Aug-2019)
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/22036/20281>
- 7 1% match (Internet from 05-Apr-2016)
http://eprints.unsri.ac.id/6122/1/03%2DJurnal_Ika_Sasti_Ferina_penilaian_kinerja_dengan_menerapkan_indikator_p
- 8 1% match (Internet from 16-Jun-2019)
<https://de.scribd.com/doc/239704034/Persepsi-Guru-Sekolah-Dasar-Terhadap-Program-Sertifikasi-Guru>
- 9 1% match (Internet from 12-Sep-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/139397-ID-faktor-penghambat-pemerintah-daerah-kabu.pdf>
- 10 1% match (Internet from 12-Apr-2016)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 782/KPTS/PPs-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat Permohonan Perubahan Judul **Sdr/ri Said Faisal Nugraha** tanggal 9 Desember 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing I
2	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : SAID FAISAL NUGRAHA
 N P M : 177122052
 Program Studi : Ilmu Administrasi
 Judul Tesis : "ANALISIS KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN SIAK".

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 12 Desember 2019
 Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.
 NPK: 92 11 02 199

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul “*Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak*”, dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Sains.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Direktur Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
4. Ibu Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos.,M.Si dan Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si. M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Ayahanda Dr. H.T.S Arif Fadillah, S.Sos.,M.Si dan Ibunda Hj. Rismarini, AMd.Keb.,S.Sos.,MM tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya selanjutnya Papa Mertua Drs. H. Supadria, M.Si dan Mama Mertua Hj. Suzi Afriyani, SH serta seluruh keluarga besar saya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.

6. Istriku Aisha Nadira Padriyani, S.STP tersayang atas kerjasama, kesabaran dan limpahan kasih sayang kita dapat menyelesaikan Magister ini secara bersama dan Anakku Ananda Syarifah Shanum Humaira Tercinta atas motivasi memberikan semangat dan limpahan kasih sayang yang tak terhingga.
7. Segenap staf Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga dan tak ternilai untuk bekal Penulis di masa yang akan datang;
8. Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Karyawan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Tesis ini;
9. Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Tokoh Masyarakat, Para Wisatawan, Pengusaha, dan Masyarakat disekitar tempat wisata di Kabupaten Siak yang telah membantu penulis dalam wawancara untuk pengumpulan data penelitian;
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi para mahasiswa Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, Amin.

Pekanbaru, Desember 2019
Penulis,

Said Faisal Nugraha

ANALISIS KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN SIAK

ABSTRAK

Oleh : Said Faisal Nugraha

Pembangunan pariwisata merupakan kegiatan dan usaha yang terkoordinir untuk menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung. Berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Siak dari tahun 2014- 2018 jumlah kunjungan tersebut belum memuaskan. Tentu permasalahan ini disebabkan karena belum terbenahnya permasalahan dan tertatanya sarana serta prasarana objek wisata yang ada di Kabupaten Siak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Siak. Teori Kinerja menurut Pasolong meliputi indikator *relevance*, *efisiensi*, *efektifitas* dan *Utility dan Sustainability*. Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*. Informan penelitian ini sebanyak 13 (tiga belas) orang Pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Teknik analisis data menggunakan Model Interactive. Secara umum, hasil penelitian bahwa Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak “cukup baik”. Kinerja Dinas Pariwisata sebagai Pengelolaan Pariwisata yaitu : Dari indikator *relevance* kinerja Dinas Pariwisata hampir seluruh perencanaan rencana kerja tercapai sesuai target khususnya di sektor pemasaran atau promosi pariwisata. Tetapi belum terlaksana dalam pembangunan infrastruktur di wisata Tasik Naga Sakti di Kecamatan Sungai Apit. Dinas Pariwisata dianggap sudah cukup *efisien* dalam menggunakan dana anggaran yang besar serta memaksimalkan keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang layak terhadap pembangunan objek wisata selain daripada Istana Siak meskipun belum optimal. Dilihat dari segi *efektivitas* kinerja Dinas Pariwisata tidak ada peningkatan dalam pembangunan, tetapi pemerintah mempermudah perizinan pendirian cottage dan memperpanjang masa perizinannya menjadi 3 tahun. Faktor yang Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak yaitu meliputi Fasilitas dan kualitas sarana prasarana di obyek wisata yang terbatas, sumberdaya manusia, fasilitas, informasi dan kewenangan dan Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaku kepariwisataan. Saran, untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Siak seharusnya dapat lebih mengembangkan seluruh objek wisata sejarah yang ada di Kabupaten Siak, sehingga objek wisata yang dapat dinikmati di Kabupaten Siak tidak hanya Komplek Kerajaan Istana Siak saja.

Kata kunci : *Kinerja, Pengelolaan, Objek Wisata.*

PERFORMANCE ANALYSIS OF TOURISM SERVICES IN TOURISM MANAGEMENT IN SIAK REGENCY

ABSTRACT

By : Said Faisal nugraha

Tourism development is a coordinated activity and effort to attract tourists to visit. Based on the number of tourists visiting Siak Regency from 2014 to 2018 the number of visits has not been satisfactory. Of course this problem is caused by the unfinished problems and the arrangement of tourist facilities and infrastructure in Siak Regency. This study aims to analyze how the performance of the Siak Regency Tourism Office in the management of tourism in Siak Regency. The Performance Theory according to Pasolong includes indicators of relevance, efficiency, effectiveness and Utility and Sustainability. This research is descriptive qualitative. The informants of this study were 13 (thirteen) Siak Regency Tourism Office Officials. Data analysis techniques using the Interactive Model. In general, the results of research show that the Performance of the Tourism Office in Tourism Management in Siak Regency is "quite good". Performance of the Tourism Office as Tourism Management, namely: From the indicator of the relevance of the performance of the Tourism Office, almost all work plan planning is achieved according to targets, especially in the tourism marketing or promotion sector. But not yet implemented in infrastructure development in the Tasik Naga Sakti tourism in Sungai Apit District. The Office of Tourism is considered to have been quite efficient in using large budget funds and maximizing the limitations of facilities and infrastructure that are less feasible for the construction of tourist objects other than the Siak Palace although not yet optimal. In terms of the effectiveness of the performance of the Tourism Office there was no increase in development, but the government facilitated the licensing of the establishment of cottages and extended the licensing period to 3 years. Factors that Siak Regency Government in managing Tourism in Siak Regency include facilities and quality of infrastructure facilities in limited tourism objects, human resources, facilities, information and authority and not yet optimal quality and quantity of tourism actors. Suggestions, for the Siak Regency Tourism Office should be able to further develop all the historical tourism objects in Siak Regency, so that the attractions that can be enjoyed in Siak Regency are not only the Royal Complex of the Siak Palace.

Keywords: Performance, Management, Tourism Objects.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	16
2.1. Tinjauan Pustaka.....	16
2.1.1. Konsep Administrasi.....	16
2.1.2. Konsep Organisasi.....	18
2.1.3. Konsep Manajemen.....	19
2.1.4. Konsep Kinerja.....	22
2.1.5. Konsep Pengelolaan.....	33
2.1.6. Konsep Pariwisata.....	40
2.2. Kerangka Pemikiran.....	51
2.3. Hasil Penelitian Terdahulu.....	52
2.4. Konsep Operasional.....	55
2.5. Operasional Variabel.....	57

BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1. Tipe Penelitian	58
3.2. Lokasi Penelitian	58
3.3. Informan Penelitian	59
3.4. Teknik Penarikan Informan.....	61
3.5. Instrument Penelitian	61
3.6. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	61
3.7. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data.....	63
3.8. Pengujian Keabsahan Data.....	65
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	66
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Siak	66
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Siak.....	66
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Siak	68
4.2 Dinas Pariwisata Kabupaten Siak	72
4.2.1 Gambaran Umum.....	72
4.2.2 Visi dan Misi.....	74
4.2.3 Tugas, Pokok dan Fungsi.....	75
4.2.4 Struktur Organisasi	84
4.2.5 Sumber Daya Manusia.....	85
BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	87
5.1 Penyajian Data Informan.....	87
5.2 Hasil Penelitian dan Observasi	90
5.3. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak.....	137
BAB VI PENUTUP	142
6.1 Kesimpulan	142
6.2 Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN.....	150

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah di Indonesia saat ini di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengenai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut rencananya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah ini, menjadikan pemerintah daerah memiliki kebebasan yang memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan kedaerah dalam bentuk urusan konkuren dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah untuk menjalankannya. Dalam Pasal 12 Urusan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah diantara urusan Pariwisata. Kegiatan pariwisata membuka ruang bagi ekonomi lainnya dan membuka lapangan kerja. Efek yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata tentu saja mendorong Pemerintah Daerah lebih berperan aktif memajukan sektor pariwisata. Pemerintah Daerah dengan mendorong kemajuan sektor pariwisata berarti membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Peran Pemerintah Daerah semakin Penting dan diperlukan pasca berlakunya otonomi daerah dimana pemerintah daerah harus aktif dan kreatif memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki (Kusworo dan Damanik, 2002).

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Dengan kontribusi yang diberikan ini, pemerintah daerah memiliki tambahan pemasukan dalam rangka pembangunan proyek-proyek maupun kegiatan lain di wilayahnya. Sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah – wilayah tertentu yang mempunyai potensi/ daya tarik wisata.

Pembangunan pariwisata merupakan kegiatan dan usaha yang terkoordinir untuk menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 2004:14). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataaan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Perkembangan pariwisata mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama

berwisata, wisatawan akan melakukan belanjanya, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*Tourism Final Demand*) pasar barang dan jasa. Selanjutnya Final Demand wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (*Investment Derieved Demand*) untuk berproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain – lain (Spillane, 2004:20).

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten Kota dijelaskan bahwa:

“Penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.”

Salah satu wilayah yang saat ini sedang gencar dalam melaksanakan pengelola pariwisata daerah adalah Kabupaten Siak. Kabupaten Siak merupakan wilayah yang kaya akan potensi alam, nilai sejarah, seni dan budaya, serta memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk tujuan pelestarian sejarah, seni dan budaya melayu, serta pembangunan ekonomi lokal. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk melestarikan potensi alam yang ada, maka Kabupaten Siak mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Siak, dengan menimbang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Adapun objek wisata yang ada yang sudah terkenal di Kabupaten Siak antara lain adalah :

1. Istana Siak Sri Indrapura
2. Masjid Sultan Syarif Hasyim
3. Kapal Kato
4. Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah
5. Gedung Tangsi Belanda
6. Klenteng Hock Siu Kiong
7. Danau Zamrud

Selain objek wisata yang sudah terkenal tersebut, saat masih ada lagi objek wisata lainnya yang sangat potensial namun belum terekspos atau terpromosikan dengan baik selama ini. Adapun objek wisata tersebut antara lain adalah

1. Balai Kerapatan Tinggi
2. Ekowisata mangrove Mengkapan
3. Jembatan Teluk Mesjid (Sultan Abdul Jalil Rahmand Syah)
4. Tepian Bandar Sungai Jantan
5. Lanscape Sawah Bunga Raya
6. Jembatan Kupu Kupu
7. Danau Naga Sakti

Dalam pelaksanaan pengelolaan pariwisata di wilayah Kabupaten Siak dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak. Adapun Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Kabupaten Siak antara lain adalah:

Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 yaitu:

***“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIAK YANG MAJU DAN SEJAHTERA
DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS DAN
BERBUDAYA MELAYU SERTA MENJADIKAN KABUPATEN SIAK
SEBAGAI TUJUAN PARIWISATA DI SUMATERA”.***

Selanjutnya untuk mencapai **Visi** tersebut, ditetapkan **Misi** Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, menarik dan bernilai jual tinggi;
2. Meningkatkan dan mengupayakan pemasaran pariwisata di tingkat Nasional maupun Internasional secara berkelanjutan;
3. Membangun dan meningkatkan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompeten dan berdaya saing.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Siak adalah melakukan pengembangan dan pembangunan urusan pariwisata.

Adapun tugas pokok Dinas Pariwisata, Kabupaten Siak dalam pembangunan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Siak adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga. Adapun fungsi Dinas Pariwisata antar lain adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pariwisata;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan telah ditetapkannya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kabupaten Siak, maka diharapkan dampak positif yang diharapkan yaitu peningkatan kunjungan wisatawan ke wilayah objek wisata di Kabupaten Siak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2017–2021 pada tabel 1.1 dibawah ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2017 – 2021

Tujuan	Kegiatan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan destinasi wisata yang berdaya saing	Pelatihan pelaku ekonomi kreatif (Jumlah peserta 10 orang)	Jumlah pengembangan infrastruktur, ekosistem destinasi dan Industri Pariwisata	Rp. 279.528.000 Batal	Batal	Batal	-	-	Pindah Ke Program SDM Pariwisata dan Ekraf

Sumber: Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 2016-2021

Pada tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa program kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam meningkatkan destinasi wisata yang berdaya saing dalam kegiatan Pelatihan pelaku ekonomi kreatif, dengan indikator sasaran meningkatnya jumlah pengembangan infrastruktur, ekosistem destinasi dan Industri Pariwisata tidak dilaksanakan pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Program kegiatan ini diganti dengan Program SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Untuk mewujudkan terselenggaranya Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Kabupaten Siak dalam menunjang pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Siak, maka segenap aparatur yang bertugas dan juga organisasi Dinas Pariwisata, Kabupaten Siak, harus senantiasa meningkatkan kinerjanya baik secara individual ataupun organisasi.

Berbicara mengenai kinerja, Prawirosentono dalam Pasolong (2008: 176) menjelaskan kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung

jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan sesuai dengan moral dan etika, sehingga dalam hal ini Prawirosentono menekankan kinerja yang berkaitan pada hasil. Berkaitan dengan kinerja sebagai hasil kerja dari sebuah organisasi tentu kinerja yang telah dicapai harus dilakukan pelaporan ketercapaian kinerja terhadap tujuan organisasi yang telah ditentukan yang dalam hal ini telah dituangkan pada Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Kabupaten Siak.

Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, maka diperlukan program-program yang mendukung tercapainya misi tersebut. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak memiliki beberapa program untuk mendukung tercapainya misi. Program-program tersebut khususnya untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Siak

Secara garis besar program kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kabupaten Siak dalam kurun waktu 2017 –2021 meliputi:

- 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 2) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata;
- 4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, disain, IPTEK, serta berbasis Seni dan Budaya;
- 5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak merencanakan Program dan Kegiatan yang mengacu pada visi dan misi Pariwisata Kabupaten Siak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan alat tulis kantor

- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 10) Penyediaan jasa keamanan kantor
 - 11) Penyediaan jasa administrasi kantor
 - 12) Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah
- B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
- 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - 3) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 4) Pengadaan mebeleur
 - 5) Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya
 - 6) Pengadan pelaratan studio dan komunikasi
 - 7) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 8) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - 9) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 10) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
- C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - 2) Pengadaan Pakaian KORPRI
 - 3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - 4) Pengadaan Pakaian Kedaerahan
- D. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
- 1) Pekan Safar ``Tradisi Ghatib Beghanyut`` Ritual Tolak Bala
 - 2) Penampilan dan festival seni kabupaten siak
 - 3) Mengikuti festival dan parade
 - 4) Penyelenggaraan Event Tour De Siak
 - 5) Pemilihan bujang dan dara tingkat daerah
 - 6) Pawai budaya Internasional
 - 7) Lomba Sampan Internasional
 - 8) Kejuaaran Pencak Silat dan Sepak Takraw Sijori Tahun 2017
 - 9) Pelaksanaan Lomba Lintas Alam di Tahura SSH Minas
 - 10) Festival Gasing Internasional Tahun 2017
 - 11) Festival Siak Bermadah
 - 12) Festival Lagu Melayu, Festival Langgam Melayu dan Festival Kompang
 - 13) Pameran Promosi Pariwisata
 - 14) Pelaksaan Koordinasi Pembangunan dan Kemitraan Pariwisata
 - 15) Pelaksanaan gebyar wisata nusantara di jakarta
 - 16) Pelaksanaan pasar wisata nasional
 - 17) Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri
 - 18) Pembinaan kesenian Tradisional
 - 19) Pembuatan / sewa Medis Space Iklan Promosi Pariwisata
 - 20) Pembuatan simbol / citra Pariwisata (*Brand Image*)
 - 21) Penampilan dan Festival seni Kabupaten Siak
 - 22) Penggadaan Bahan Promosi
 - 23) Pengembangan Jaringan Kerjasama promosi Pariwisata

- 24) Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
- 25) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
- 26) Promosi potensi dan objek pariwisata
- 27) Sosialisasi Undang-undang, Peraturan Daerah tentang Pariwisata (TDUP)

E. PROGRAM DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

- 1) Pelatihan pelaku ekonomi kreatif
- 2) Penataan kawasan objek wisata (DAK)
- 3) Pembangunan taman burung (Lanjutan)
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Istana Sultan Siak
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Masjid Bersejarah
- 6) Penyusunan DED (Detail Engineering Design)
- 7) Pembangunan Destinasi, Sarana dan Prasarana Wisata Air Sungai Siak
- 8) Pembangunan landscape taman burung
- 9) Penataan Kawasan Wisata Istana Siak
- 10) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
- 11) Pembangunan Sarana Penunjang Kawasan Ekowisata Mempura (Jalan Akses, Pagar, Drainase)
- 12) Pemeliharaan rutin/ berkala taman; gedung peninggalan bersejarah
- 13) Penataan Kawasan Wisata
- 14) Perencanaan Penataan Objek Wisata Peninggalan Bersejarah
- 15) Rehabilitasi Sedang/Berat Peninggalan bersejarah

F. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- 1) Penampilan dan festival seni kabupaten siak
- 2) Mengikuti festival dan parade
- 3) Pemilihan bujang dan dara tingkat daerah
- 4) Pawai budaya Internasional
- 5) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
- 6) Pelatihan pelaku ekonomi kreatif
- 7) Sosialisasi Undang-undang, Peraturan Daerah tentang Pariwisata (TDUP).

Pada penerapannya pengembangan destinasi dan industri pariwisata berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Tahun 2019 diarahkan untuk:

a. Destinasi

- 1) Pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan melalui perancangan destinasi (kawasan strategis pariwisata nasional), amenitas pariwisata, aksesibilitas pariwisata dan ekosistem pariwisata;
- 2) Pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya

saing melalui pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi;

- 3) Peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat melalui tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat .

b. Industri

- 1) Meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industry pariwisata nasional melalui kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi pariwisata;
- 2) Pariwisata Meningkatkan keragaman dan daya saing produk jasa nasional di setiap destinasi pariwisata;
- 3) Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal.

Dinas Pariwisata di Kabupaten Siak telah berusaha meningkatkan ekonomi masyarakat melalui keberadaan objek wisata di Kecamatan Siak, namun partisipasi Dinas Pariwisata belum menunjukkan hal yang baik atau ekonomi masyarakat belum meningkat sesuai yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala yang terlihat di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata, terdiri dari 1 Urusan, 4 program dan 38 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Tahun 2018 dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 98,41 % dan realisasi keuangan sebesar 92,37%, sedangkan penyerapan dana sebesar

Rp. 15.735.760.651,00 (diluar belanja tidak langsung). Masih belum maksimalnya realisasi penyerapan dana tersebut disebabkan: keterbatasan sumber daya aparatur yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas; serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung lainnya; Adanya Kegiatan yang tidak terlaksanakan. (Lakip Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2018:37)

2. Program pembinaan masyarakat di Kabupaten Siak yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak baik berupa kegiatan penyuluhan sadar wisata dan juga pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan sangat minim, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti penting kepariwisataan hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan.
3. Animo masyarakat yang berada di sekitar objek wisata untuk membuka usaha kuiner, kedai ataupun cendera mata masih tergolong rendah. Disekitaran objek-objek wisata jarang dijumpai penduduk tempatan membuka jeis usaha tersebut dan hanya diminati oleh pedagang kaki lima yang merupakan musiman yang bertempat tinggal di wilayah lainnya diluar wilayah Kabupate Siak. Kurangnya partisipasi masyarakat setempat dalam mengembangkan objek pariwisata mengakibatkan kurangnya sarana-dan saran pendukung wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan dan ini berarti bahwa keberadaan objek-objek wisata di Kabupaten Siak tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Siak dari tahun 2014- 2018 jumlah kunjungan tersebut belum memuaskan. Tentu permasalahan ini disebabkan karena belum terbenahnya permasalahan dan tertatanya sarana serta prasarana objek wisata yang ada di Kabupaten Siak, kemudian masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pariwisata yang mengakibatkan daya saing pariwisata Kabupaten Siak masih rendah, pemasaran pariwisata yang belum tepat sasaran terhadap peningkatan kunjungan, serta fasilitas penunjang kepariwisataan di Kabupaten Siak yang belum memadai. Seharusnya berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Siak akan keragaman objek wisata yang ada, Kabupaten Siak sudah seharusnya memiliki prospek yang menjanjikan dalam pengembangan pariwisata. Dalam arti, produk wisata yang beragam merupakan sebuah potensi dalam pemasaran secara luas dan menentukan segmentasi pasar wisata sehingga wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Siak selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung masih belum optimal jika dibandingkan dengan perencanaan kunjungan wisatawan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Siak.

Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak diketahui jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Siak pada tahun 2018 berjumlah 156.181 orang wisatawan atau meningkat 233,11% dari target yang direncanakan yaitu 67.000 orang wisatawan. Adapun data kunjungan wisatawan

mancanegara dan wisatawan nusantara dari tahun 2012- 2016 akan dijelaskan pada tabel dan grafik dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Siak Tahun 2012-2015

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Wisatawan Nusantara	48.142	70.317	89.877	99.178	142.536
2.	Wisatawan Mancanegara	5.303	8.907	6.915	6.705	13.645
Jumlah		53.445	79.224	96.792	105.883	156.181

Sumber: Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 2016-2021

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik ataupun wisatawan asing ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Siak. Jumlah kunjungan wisata tertinggi adalah wisatawan nusantara.

5. Dalam melakukan kunjungan wisata, dari informasi yang didapatkan melalui wawancara awal peneliti dengan salah seorang wisatawan yang datang berkunjung ke lokasi wisata Tasik Naga Sakti di Kecamatan Sungai Apit, diketahui bahwa, wisatawan sangat kecewa dengan informasi yang disampaikan oleh biroperjalanan wisata mengenai lokasi dan kondisi danau Naga Sakti yang tidak sesuai dengan informasi atau iklan yang diberikan. Dimana untuk mencari titik lokasi wisata alam tersebut sangatlah sulit, karena baik dari segi petunjuk jalan ataupun informasi lokasi objek wisata tersebut, tidak dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, petunjuk jalan kelokasi tersebut tidak ditemukan begitu juga dengan infrastruktur jalan yang dilalui sangat tidak terawat dengan baik. Begitu juga sesampai dilokasi objek wisata danau Nagasakti tersebut, tidak ada ditemukan petugas penjaga dan juga pagar jalan masuk kelokasi tersebut tertutup. Hal ini sangat tidak sesuai

dengan iklan wisata yang disampaikan baik oleh situs resmi pemerintah Kabupaten Siak dan juga infor dari agen wisata tempat wisatawan tersebut melakukan perjalanan wisata.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan adanya suatu penelitian untuk menganailis kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Siak. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul : *“Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak”*

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian adalah “Bagaimanakan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Siak?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran utama yang ingin dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kajian mengenai kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Siak.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan konstektual dan konseptual dan kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga instansi yang bersangkutan. Kegunaan penelitian ini dijelaskam sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperoleh wawasan dalam menerapkan teori-teori mengenai pengelolaan pariwisata dan sosial ekonomi.
- b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmiah dan menjadi sumber referensi tambahan bagi mahasiswa.
- c. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Siak dan lebih aktif menggali sumber-sumber pendapatan dari masyarakat khususnya dibidang pariwisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Administrasi

Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris, dari kata Administration yang bentuk infinitifnya adalah administer. Kata Administrasi juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu Administratie yang mempunyai pengertian mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegevens* (tata usaha), *bestuur* (manajemen dari kegiatan-kegiatan orang), *Beheer* (manajemen dari sumber daya, seperti *financial*, personel, gudang), (Silalahi, 2009:2)

Sedangkan Silalahi menyatakan bahwa :

“Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.” (Silalahi, 2009 : 5)

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi secara sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data yang bermaksud untuk mempermudah memperolehnya kembali. Sehingga tujuannya hanya sebagai data atau catatan dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Menurut Sagala (2006:40) secara teoritik pengertian administrasi melayani secara intensif, sedangkan secara etimologis administrasi dalam bahasa inggris “*administer*” yaitu kombinasi dari kata latin yang terdiri dari *Ad* dan *Ministrare* yang berarti “*to serve*” melayani, membantu dan memenuhi. Lebih jelas lagi kata *Ad*

artinya intensif sedang *Ministre* berbentuk kata benda yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan.

Menurut Siagian dalam Safie (2003:5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam proses-proses yang terjadi di dalam organisasi tersebut, di butuhkan suatu bentuk pengelolaan dari keseluruhan proses pencapaian tujuan yang baik untuk mencapai tujuan dari organisasi, agar tujuan tersebut benar-benar dapat tercapai. Bentuk pengelolaan dari proses tersebut biasanya disebut dengan manajemen yaitu kegiatan yang terarah melaksanakan usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, ciri – ciri administrasi dapat digolongkan atas: 1. Adanya tujuan yang dicapai, 2. Adanya sekelompok orang yang bekerja sama, 3. Adanya kegiatan / proses / usaha yang dilakukan, 4. Didasarkan atas rasionalitas.

Pengertian administrasi dalam arti luas merupakan suatu proses rangkaian kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing masing dalam sebuah hirarki organisasi yang saling mendukung dan melengkapi untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dengan kata lain pengertian administrasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuanyang disepakati bersama.

2.1.2. Konsep Organisasi

Organisasi secara umum merupakan bentuk kerja sama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Siagian, (2006:6), menjelaskan organisasi seperti berikut :

“Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.”

Menurut Rosenweg dalam Hamin (2005:31) organisasi dapat dipandang sebagai:

- a. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok;
- b. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang berkerja sama;
- c. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Menurut Waldo dalam Safiie (2003:114) organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa definisi organisasi menurut para ahli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi;
2. Terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut;
3. Berlangsung proses aktivits berdasarkan kinerja masing-masing;
4. Di dalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.

Istilah organisasi dapat pula diartikan sebagai suatu perkumpulan atau perhimpunan yang terdiri dari dua orang atau lebih punya komitmen bersama dan ikatan formal mencapai tujuan organisasi, dan di dalam perhimpunannya terdapat hubungan antar anggota dan kelompok dan antara pemimpin dan anggota yang dipimpin atau bawahan (Ubben:1987: 81).

2.1.3. Konsep Manajemen

Setiap orang pasti berkeinginan agar suatu kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efektif. Agar hal tersebut dapat tercapai, maka diperlukan pengaturan yang baik. Demikian juga kegiatan dan atau pelayanan kesehatan masyarakat memerlukan pengaturan yang baik, agar tujuan tiap kegiatan atau program itu tercapai dengan baik.

Banyak ahli yang telah membuat batasan tentang manajemen ini antara lain :

- a. Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan orang lain
- b. Manajemen adalah proses dimana pelaksanaan dari suatu tujuan diselenggarakan dan diawasi.
- c. Manajemen adalah membuat tujuan tercapai melalui kegiatan-kegiatan orang lain dan fungsi-fungsinya dapat dipecah sekurang-kurangnya 2 tanggung jawab utama, yakni perencanaan dan pengawasan.
- d. *Management is the process under taken by one or more persons to coordinate the activities of other persons to achieve results not attainable by any one person acting alone* atau manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain guna mencapai hasil (tujuan) yang tidak dapat dicapai oleh hanya 1 orang saja. (Ivancevich, 1996)

Dari batasan-batasan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan umum bahwa manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Seorang manajer dalam mencapai tujuan adalah secara bersama-sama dengan orang lain atau bawahannya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen memiliki beberapa ciri antara lain :

- a. Manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan
- b. Manajemen sebagai proses; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan
- c. Tersedia sumber daya; manusia, material dan sumber lain
- d. Mendayagunakan atau menggerakkan sumber daya tersebut secara efisien dan efektif

- e. Terdapat orang yang menggerakkan sumber daya tersebut (manajer)
- f. Penerapan manajemen berdasarkan ilmu dan juga seni atau keahlian yang harus dimiliki oleh manajer

Ada 3 alasan penting, mengapa suatu organisasi perlu menerapkan manajemen yaitu: untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan tujuan-tujuan yang ada dalam organisasi, agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh seorang manajer. Banyak ahli manajemen yang menyampaikan tentang fungsi manajemen ini, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, bahkan pendapat satu dengan lainnya saling melengkapi. Para ahli manajemen, antara lain ; George Terry, L. Gullick, H. Fayol dan Koonzt O'Donnel mengemukakan tentang fungsi manajemen sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perbandingan Fungsi Manajemen

George Terry	L. Gullick	H. Fayol	Koonzt O'Donnel
Planning	Planning	Planning	Planning
Organizing	Organizing	Organizing	Organizing
Actuating	Staffing, Directing, Coordinating	Commanding, Coordinating	Staffing, Directing
Controlling	Reporting	Controlling	Controlling

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Dari keempat ahli manajemen tersebut, ternyata banyak kesamaan, dan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Suatu kegiatan atau proses penganalisisan, pemahaman sistem, penyusunan konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan demi masa depan yang lebih baik.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*),

Langkah untuk menetapkan, menggolong-golongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok dan wewenang serta pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

3. Fungsi Penggerakan Pelaksanaan (*Staffing, Commanding, Directing, Coordinating*),

Usaha untuk menciptakan iklim kerjasama diantara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

4. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian (*Controlling, Reporting*).

Merupakan proses untuk mengamati secara terus menerus (berkesinambungan) pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi (perbaikan) terhadap penyimpangan yang terjadi. Untuk menjalankan fungsi ini diperlukan adanya standar kinerja yang jelas. Dari standar tersebut dapat ditentukan indikator kinerja yang akan dijadikan dasar untuk menilai hasil kerja (kinerja) pegawai. Adanya indikator kinerja, akan memudahkan dalam melakukan koreksi apabila ada penyimpangan.

Prinsip-prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Menurut Fayol, seorang industrialis asal Perancis, prinsip-prinsip dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur dalam arti bahwa perlu di pertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Prinsip – prinsip umum manajemen menurut Fayol dalam Manullang (1990:36) terdiri dari.

- a. Pembagian kerja (*Division of work*)
- b. Wewenang dan tanggung jawab (*Authority and responsibility*)
- c. Disiplin (*Discipline*)

- d. Kesatuan perintah (*Unity of Command*)
- e. Kesatuan pengarahan (*Unity of Direction*)
- f. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri
- g. Penggajian pegawai
- h. Pemusatan (*Centralization*)
- i. Hirarki (Tingkatan)
- j. Ketertiban (*Order*)
- k. Keadilan dan Kejujuran
- l. Stabilitas Kondisi Karyawan
- m. Prakarsa (*Inisiative*)
- n. Semangat Kesatuan dan Semangat Korps

2.1.4. Konsep Kinerja

Secara etimologis kinerja berasal dari kata dasar kerja. Kinerja memiliki padanan kata dalam bahasa Inggris yaitu *Performance* yang diartikan melaksanakan daya guna atau tugas. Sementara itu, ditinjau dari sudut terminologis beberapa ahli telah mengungkapkan beberapa pendapatnya mengenai kinerja. Kinerja apabila dikaitkan dengan *performance* sebagai kata benda (*noun*), maka pengertian *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika.

Sedangkan Sedarmayanti (2007: 260) menyatakan bahwa kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya). Wibawa dan Atmosudidjo menyatakan dalam Pasolong (2010:176), Kinerja adalah efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-

usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mangkunegara (2005 : 67), kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Konsep kinerja menurut Pasalong, pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi berkaitan sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika.

2.1.4.1. Jenis-Jenis Kinerja

Kinerja suatu organisasi, baik yang bergerak dibidang yang berorientasi mencari keuntungan, organisasi pemerintah atau organisasi pendidikan semuanya tergantung kinerja dari peserta organisasi yang bersangkutan. Meskipun setiap organisasi

memiliki ragam tujuan yang berbeda di nilai berkinerja baik bila meraih keberhasilan, hal ini disebabkan etos kerja dalam bentuk kinerja karyawan sebagai pelaku organisasi yang baik. Keberhasilan organisasi dengan ragam kinerja tergantung pada kinerja peserta organisasi yang bersangkutan. Unsur manusialah yang memegang peranan sangat penting dan menentukan keberhasilan mencapai tujuan organisasi, menurut Sedarmayanti (2007:74) di dalam organisasi terdapat tiga jenis kinerja yaitu :

a. Kinerja Strategik

Kinerja strategik biasanya berkaitan dengan strategi dalam penyesuaian terhadap lingkungannya dan kemampuan dimana suatu organisasi berada. Biasanya kebijakan strategik dipegang oleh top manajer karena menyangkut strategi dalam menghadapi pihak luar, dan juga kinerja strategik harus mampu membuat visi kedepan tentang kondisi makro ekonomi negara yang berpengaruh pada kelangsungan organisasi.

b. Kinerja Administratif

Kinerja administratif berkaitan dengan kinerja administrasi organisasi. Termasuk didalamnya tentang struktur administratif yang mengatur hubungan otoritas (wewenang) dan tanggung jawab dari orang yang menduduki jabatan atau bekerja pada unit-unit kerja yang terdapat dalam organisasi. Disamping itu, kinerja administratif berkaitan dengan kinerja dari mekanisme aliran informasi antar unit kerja dalam organisasi, agar tercapai sinkronisasi kerja antar unit kerja.

c. Kinerja operasional

Kinerja operasional berkaitan dengan efektifitas penggunaan setiap sumber daya yang digunakan organisasi. Kemampuan mencapai efektifitas penggunaan sumber daya (modal, bahan baku, teknologi, dan lain-lain) tergantung kepada sumber daya manusia yang mengerjakan.

Sedangkan menurut Pasolong (2010:178) ada beberapa jenis kinerja, yaitu :

- a) Kinerja organisasi, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari organisasi dan dapat dipengaruhi oleh kinerja sebagai alat ukur, sehingga kinerja tersebut dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi orang.
- b) Kinerja proses, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari bekerjanya mekanisme kerja organisasi dipengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan standar kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.
- c) Kinerja individu, yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari hasil kerja individu (produktivitas kerja), dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam diri individu yang membutuhkan standar kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu.

2.1.4.2. Model Pengukuran Kinerja

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan untuk melakukan pengukuran kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. Pengukuran kinerja hanya dapat dilakukan terhadap kinerja nyata dan terukur. Menilai kinerja organisasi harus mempunyai alasan dan tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut. Ada dua jenis organisasi yaitu organisasi *privat* dan *non privat*, bagi organisasi privat tujuan pembentukannya adalah memproduksi barang untuk mendapatkan keuntungan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar ia mampu memproduksi (*productivity*) dan seberapa besar keuntungan yang dapat diraih (*economy*).

Sedangkan organisasi publik masih sulit untuk menentukan kriteria kinerja yang sesuai. Bila ditinjau dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah memenuhi dan melindungi kepentingan publik, maka kinerja organisasi publik dapat

dikatakan berhasil apabila mampu mewujudkan misinya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik tersebut. Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan.

Adapun tujuan penilaian kerja di sektor publik adalah untuk:

- Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
- Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
- Memperbaiki kinerja periode berikutnya.
- Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward and punishment*.
- Memotivasi pegawai
- Menciptakan akuntabilitas publik.

Mengenai kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik ini dikemukakan oleh Dwiyanto dalam Riyanti (2014:18) bahwa:

“Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul karena misi dan tujuan organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multi dimensional. Organisasi publik memiliki *Stakeholders* yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. *Stakeholder* organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan antara satu dengan yang lain.”

Namun berdasarkan atas pemahaman terhadap tujuan dan misi organisasi, Levine mengusulkan tiga konsep untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu: *responsiveness*, *responsibility*, dan *accountability*. Sedangkan Dwiyanto dalam Pasalong (2010:178), menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas

didefinisikan sebagai suatu perwujudan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan oleh media. Dalam suatu birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

2. Responsivitas

Responsivitas yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasannya antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah memiliki kinerja yang jelek juga.

3. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi baik yang implisit ataupun yang eksplisit. Semakin kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, peraturan dan kebijaksanaan organisasi maka kinerja yang dinilai adalah semakin baik.

Pasolong (2010:180) menambahkan Mutu kerja karyawan secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan. Guna mendapatkan kontribusi karyawan yang

optimal, manajemen harus memahami secara mendalam strategi untuk mengelola, mengukur dan meningkatkan kinerja, yang dimulai terlebih dahulu dengan menentukan tolak ukur kinerja. Ada beberapa syarat tolak ukur kinerja yang baik, yaitu:

- a. Tolak ukur yang baik, haruslah mampu diukur dengan cara yang dapat dipercaya.
- b. Tolak ukur yang baik, harus mampu membedakan individu-individu sesuai dengan kinerja mereka.
- c. Tolak ukur yang baik, harus sensitif terhadap masukan dan tindakan-tindakan dari pemegang jabatan.
- d. Tolak ukur yang baik, harus dapat diterima oleh individu yang mengetahui kinerjanya sedang dinilai.

Ada model kinerja yang dikemukakan Nasucha dalam Pasolong (2010:180), menurutnya model dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik antara lain adalah:

1. Pelayanan yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan.
2. Ekonomi yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah dari pada yang direncanakan.
3. Efisiensi yang menunjukkan perbandingan penghasilan yang dicapai dengan pengeluaran.
4. Efektivitas yang menunjukkan perbandingan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai.
5. *Equity* yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dari kebijakan yang dihasilkan.

Model pengukuran kinerja lainnya diukur oleh Christopher Pollit dan Greet Bouckaert dalam Keban, (2014:224) adalah model *input/output*. Model tersebut mengasumsikan bahwa institusi atau program dibangun untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi tertentu. Berdasarkan kebutuhan tersebut disusun tujuan organisasi atau program. Organisasi atau program menyediakan *input* (staff, gedung, sumber daya), menyusun kegiatan-kegiatan (*activities*) untuk mengolah input tersebut dalam proses tertentu untuk menjadi *output*. *Output* yang dihasilkan kemudian berinteraksi

dengan lingkungan sehingga memberi hasil tertentu (*results*) atau disebut *intermediate outcomes*, dan dalam jangka panjang hasil tersebut menjelma menjadi dampak atau *final outcomes*. Dalam model ini parameter penilaian kinerja terdiri atas relevansi, efisiensi, efektivitas serta *Utility* dan *Sustainability*.

1. Menurut Pollit dalam Keban, (2014:224) *Relevance*, yaitu mengukur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *relevance* berarti hubungan, kecocokan atau keterkaitan. Relevansi dalam pengelolaan pariwisata pada penelitian ini adalah mengukur kesesuaian antara kebutuhan dalam pembangunan pariwisata dengan hasil yang telah dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak khususnya pembangunan sarana dan prasarana wisata yang ada di Kabupaten Siak.
2. Menurut Pollit dalam Keban, (2014:224) efisiensi, yaitu perbandingan antara input dan output. Menurut Sutawijaya, dkk (2009:53). Efisiensi dalam konsep produksi terbatas pada melihat hubungan teknis dan operasional dalam suatu proses produksi, yaitu konversi input menjadi output.
3. Menurut Pollit dalam Keban, (2014:224) mengungkapkan efektivitas, yaitu tingkat kesesuaian antara hasil (*Intermediate outcome*) akan pengaruhnya (*Final outcomes*). Menurut Mahmudi, (2005:92) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Dalam pendekatan ini yang dinilai adalah ketepatan hasil sesuai dengan harapan dan rencana atau lebih populernya disebut kriteria efektivitas. Parameternya adalah hasil apa dan berapa yang dapat dinikmati siapa yang mengambil manfaatnya, dan berapa yang dapat menikmati hasil tersebut, kapan dinikmati dan dimana menikmatinya.
4. Menurut Pollit dalam Keban, (2014:224) mengungkapkan *Utility* dan *Sustainability*, digunakan untuk mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan pengaruhnya (*impact*). Sedangkan menurut Budimanta (2005:26) menyatakan bahwa program berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Dari beberapa uraian diatas sudah jelas bahwa tujuan model pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan

tugasnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model pengukuran kerja oleh Christopher Pollit dan Greet Bouckaert dalam Keban (2014:224). Sebelum adanya reformasi pada sektor publik penekanan kinerja hanya pada pengendalian input, pemenuhan standar dan kepatuhan anggaran, namun setelah adanya reformasi pada sektor publik kinerja bergeser pada pengukuran *outcome*, manfaat serta dampaknya kepada masyarakat.

2.1.4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Setiap organisasi memiliki faktor penentu dalam pencapaian kinerja yang berbeda, hal tersebut dikarenakan setiap organisasi memiliki visi dan misi yang berbeda. Nadhiroh (2010:82) mengatakan ada tiga variabel yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu:

1. Variabel individu, variabel individu terdiri dari pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, umur, motivasi, keadaan fisik dan kepribadian.
2. Variabel lingkungan, hal-hal yang menentukan variabel lingkungan seperti faktor sosial dan organisasi, meliputi: kebijakan, jenis latihan serta pengalaman, sistem upah serta lingkungan sosial, tekanan waktu kerja, akuntabilitas dan tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi.
3. Variabel tugas, hal-hal yang menentukan variabel tugas seperti faktor fisik dan pekerjaan baik dari dalam ataupun luar tugas, meliputi: metode kerja, pengaturan dan kondisi, perlengkapan kerja, pengaturan ruang kerja, kebisingan, format presentasi, kompleksitas tugas dan pengolahan data.

Menurut Steers dalam Pasolong (2010:185) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

1. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja.
2. Kejelasan dan penerimaan atau kejelasan peran seseorang pekerja yang merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang atas tugas yang diberikan kepadanya.
3. Tingkat motivasi pekerja yaitu daya energi yang mendorong, mengarahkan dan mempertahankan perilaku.

Pasolong juga menyebutkan enam kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pegawai secara individu yakni :

1. Kualitas
Kualitas adalah hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati sempurna atau memenuhi tujuan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut.
2. Kuantitas
Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan atau jumlah aktivitas yang dapat diselesaikan.
3. Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu yaitu dapat menyelesaikan tugas atau kegiatan pada waktu yang telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas yang lain.
4. Efektifitas
Efektifitas adalah pemanfaatan secara maksimal sumberdaya yang ada pada suatu organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian
5. Kemandirian
Kemandirian yaitu dapat melaksanakan kerja tanpa bantuan guna menghindari hasil yang merugikan.
6. Komitmen Kerja
Kegunaan dari komitmen kerja adalah adanya komitmen kerja antara pegawai dengan organisasinya dan tanggung jawab pegawai terhadap organisasinya.

Sedangkan dalam konteks pemerintahan dalam organisasi sektor publik Mahsun (2006:196) mengatakan bahwa ada beberapa aspek yang dapat dinilai kinerjanya yaitu:

1. Kelompok Masukan (*Input*), yang dimaksud dengan input misalnya:
 - a. Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - c. Jumlah infrastruktur yang ada
 - d. Jumlah waktu yang digunakan.
2. Kelompok Proses, kelompok proses biasanya meliputi:
 - a. Ketaatan pada peraturan perundangan
 - b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan sebuah layanan jasa
3. Kelompok Keluaran (*Output*), kelompok output contohnya:
 - a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
 - b. Ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa
4. Kelompok Hasil (*Outcame*), misalnya
 - a. Tingkat produk dan jasa yang dihasilkan
 - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai

5. Kelompok Manfaat (Benefit), misalnya:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat
6. Kelompok Dampak (Impact), misalnya:
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat.

Fokus pengukuran kinerja sektor publik justru terletak pada *outcome* dan bukan *input* dan proses *outcome* yang dimaksud adalah *outcome* yang dihasilkan oleh individu ataupun organisasi secara keseluruhan, *outcome* harus mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan organisasi sektor publik.

2.1.4.4. Penilaian Kinerja

Pada prinsipnya penilaian kinerja merupakan cara pengukuran kontribusi dari individu dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atau kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Penilaian kinerja intinya adalah untuk mengetahui seberapa produktifkah seorang karyawan dan apakah ia bisa berkerjasama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi dan masyarakat memperoleh manfaat.

1. Evaluasi yang menekankan perbandingan antar orang,
2. Pengembangan yang menekankan perubahan-perubahan dalam diri seseorang dengan berjalannya waktu,
3. Pemeliharaan sistem, dan
4. Dokumentasi keputusan-keputusan sumber daya manusia.

2.1.5. Konsep Pengelolaan

2.1.5.1. Pengertian Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen. Manajemen adalah suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain, atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. menurut Stoner dalam Sudjana (2000:17) memberi arti pengelolaan sebagai berikut “*Management as working with and through individuals and groups to accomplish organizational goals*” (pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang sertakelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi). Leiper dalam Pitana (2009: 80), menyatakan pengelolaan (manajemen) merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau juga bisa merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Ahli manajemen mengemukakan sudut pandang yang hampir sama mengenai urutan fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen Leiper dalam Pitana (2009:80) yaitu *Planning* (perencanaan), *Directing* (mengarahkan), *Organizing* (termasuk *coordinating*), *Controlling* (pengawasan).

Sumijo dan soebedjo dalam Sudjana (2000:17) mengemukakan bahwa :”*Management is the process of planning, organizing, leading and controlling the efforts of organizing members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals*” Kalau kita kaji dari kedua pengertian tersebut di atas, ternyata implementasi dari pengertian tersebut adalah : manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan secara inovatif terhadap segala upaya dalam

mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari pengertian manajemen di atas, terdapat tiga dimensi yang sangat krusial, yaitu : Pertama dalam manajemen terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola (pemimpin, kepala, komandan, ketua dan lain sebagainya) bersama orang lain atau kelompok. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya kemampuan dan keterampilan khusus yang perlu dimiliki pengelola untuk melakukan hubungan kemanusiaan dengan orang lain dan untuk mempengaruhi orang lain baik melalui hubungan perorangan maupun melalui hubungan kelompok. Kemampuan dan keterampilan khusus tersebut dapat terlihat pada interaksi antara pihak yang memimpin/pengelola dan pihak yang dipimpin/staf atau bawahan. Hubungan kemanusiaan ini terjadi apabila pihak yang memimpin dan yang dipimpin itu terdiri atas kelompok. Kedua, menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dimensi ini member makna bahwa kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Sedangkan dimensi ketiga adalah, bahwa pengelolaan itu dilakukan dalam organisasi, sehingga tujuan yang akan dicapai itu merupakan tujuan organisasi. Dengan kata lain tujuan organisasi dicapai melalui kegiatan yang dilakukan bersama orang lain baik perorangan maupun kelompok. Jadi tiga dimensi tersebut meliputi kegiatan melalui dan/atau bersama orang lain – tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan organisasi, memerlukan kehadiran pengelola yang memiliki kemampuan dan keterampilan tentang hubungan kemanusiaan untuk

mempengaruhi orang-orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Qalyubi, 2007: 271).

Bedasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan

yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

2.1.5.2. Fungsi Pengelolaan

Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: *perencanaan (planning)*, *pengorganisasian (organizing)*, *pengarahan (actuating)*, dan *pengawasan (controlling)*.

a. Perencanaan (*Planning*)

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan

dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Menurut Arikunto (2010;38) aspek perencanaan meliputi:

- 1). Apa yang dilakukan?
- 2). Siapa yang melakukan?
- 3). Di mana akan melakukan?
- 4). Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?
- 5). Bagaimana melakukannya?
- 6). Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maximum?

Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaanya. Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (*manager*) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut harus dilakukan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Rue (2006:6) berpendapat: *Organizing is grouping activities, assigning activities an providing the authority necessary to carry out the activities.* Pengorganisasian

merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

c. Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*)

Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*) menurut Terry dalam Sukarna (2011: 82) mengatakan bahwa :

“Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts”

“Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha - usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.

Actuating disebut juga “gerakan aksi mencakup kegiatan yang dilakukan seorang pimpinan untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuantujuan dapat tercapai. Dari

seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. (Rahman,2011).

Actuating mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka menurut Terry, 2006 dalam (Herman:2009)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa actuating/pelaksanaan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno.2004:128).

Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen dilaksanakan untuk mengetahui:

- a. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.
- b. Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan.
- c. Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan.
- d. Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi.

Tujuan pengawasan adalah:

1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.
2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.
3. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaannya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

2.1.6. Konsep Pariwisata

2.1.6.1. Konsep Pariwisata

Menurut arti katanya, pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “pari” yang artinya penuh, seluruh, atau semua, dan “wisata” yang berarti perjalanan. Kata pariwisata dapat diartikan perjalanan penuh, mulai dari berangkat dari suatu tempat, ke satu atau beberapa tempat lain dan singgah, kemudian kembali ke tempat semula (Kuncoro, 2004:295).

Menurut Damanik (2006:1), pariwisata dalam arti luas adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia, barang, dan jasa yang sangat kompleks. Ia terikat erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, peyediaan kebutuhan layanan, dan sebagainya.

Menurut Hadinoto (1996:32-34), sistem pariwisata terdiri dari lima (5) komponen besar, dimana komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang memerlukan keterkaitan, ketergantungan dan keterpaduan, yaitu :

1. Atraksi Wisata : adalah daya tarik wisatawan seperti sumber daya manusia-budaya dan adat istiadat, dan sebagainya.
2. Promosi merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi merupakan bagian yang penting.
3. Pasar (Asal Wisatawan); merupakan bentuk analisis mendalam tentang trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi dan hal-hal lain yang menyangkut wisatawan.
4. Transportasi ; menyangkut orang ke dan dari destinasi pariwisata.
5. Fasilitas/ Pelayanan ; untuk mendukung aktivitas pariwisata, yang didominasi pihak swasta.

Dari pengertian pariwisata di atas, dapat diketahui bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang mengeluarkan biaya. Biaya-biaya yang dimaksud antara lain biaya konsumsi, biaya menginap, biaya transportasi dan lain-lain. Berkaitan dengan itulah. maka kunjungan wisatawan mempunyai dampak ekonomi kepada daerah tujuan wisata yang didatangi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung adalah dengan adanya kunjungan wisatawan, maka akan menciptakan permintaan terhadap fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan jasa industri pariwisata seperti hotel atau losmen, rumah makan, sarana angkutan atau travel biro, dan berbagai jenis hiburan yang lain. Dengan adanya kegiatan pemenuhan kebutuhan

wisatawan ini, akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak tidak langsung adalah sebagai pemicu perkembangan bidang-bidang lainnya seperti pembangunan daerah yang bersangkutan, pendapatan asli daerah, industri, dan lain-lain (Yoeti, 2002:57-58).

Dari beberapa batasan diatas, terdapat beberapa faktor penting yang ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor yang dimaksud ialah, (Yoeti:1996:118)

- d) Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu.
- e) Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain.
- f) Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi.
- g) Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen ditempat tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor diatas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

2.1.6.2. Manfaat Pariwisata

Manfaat pariwisata yang paling utama adalah bagi orang secara pribadi sebagai sarana hiburan. Dalam waktu-waktu liburan umpamanya kita perlu melepaskan diri dari suasana tegang dan kelelahan akibat pekerjaan sehari-hari. Berwisata ke pantai

atau pegunungan akan menimbulkan rasa segar sehingga kita siap untuk bekerja kembali.

Lebih dari sebagai sarana hiburan, sebenarnya pariwisata dan hal-hal yang berhubungan dengannya merupakan salah satu sumber devisa bagi Negara. Sebagai contoh, objek-objek wisata biasanya menarik pajak dari setiap pengunjung dalam bentuk karcis masuk. Ini lebih tampak pada wisata asing, mereka datang dengan belanja yang cukup besar sehingga menambah pemasukan devisa. Belanja wisatawan yang berupa valuta asing tersebut akan makin memperkuat neraca pembayaran Negara tujuan.

Negara juga menerima pajak-pajak dari sektor usaha yang bersangkutan-paut dengan kepariwisataan. Dari pajak industri perhotelan saja tidak sedikit pajak yang disumbangkan kepada Negara. Industri hotel memerlukan daging, telur, sayur, alat-alat dekorasi dan lain-lain. Hal ini merangsang usaha-usaha peternakan, pertanian, perkebunan, industri ringan seperti barang cenderamata yang dibutuhkan oleh wisatawan. Dalam putaran selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut memerlukan makanan ternak, pupuk atau bahan baku dekorasi sehingga menumbuhkan rangkaian kegiatan ekonomi lain.

Wisatwan-wisatawan yang membeli souvenir barang-barang seni akan merangsang kegiatan kreasi seni sehingga seniman-seniman memerlukan bahan-bahan tertentu untuk ungkapan kreasi seninya berupa: kayu, cat, kertas, amplas, dan lain-lain. Para pengrajin terangsang pula untuk memproduksi barang-barangnya lebih banyak lagi. Toko souvenir akan tumbuh sebagai penyalur barang-barang kreasi seni maupun produksi pengrajin.

Lebih lanjut Pendit (2002: 33) menjelaskan tentang kepariwisataan sebagai berikut : Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan-pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, proyek sarana budaya dan kelestarian lingkungan, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi wisatawan dalam lingkungan wilayah yang bersangkutan, maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, di mana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan di tengah-tengah industri lainnya. Adapun yang menjadi manfaat Pariwisata adalah :

1. Meningkatkan hubungan yang baik antar bangsa dan negara ;
2. Membuka kesempatan kerja serta perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat;
3. Merangsang dan menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat ;
4. Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, pendapatan daerah, dan devisa negara ;
5. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan ;
6. Membantu dan menunjang gerak pembangunan, seperti penyediaan sarana dan perasarana yang diperlukan ;
7. Menjaga kelestarian flora, fauna, dan lingkungan.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah :

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata ;
2. Memupuk rasa cinta tanah air ;
3. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja ;
4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan dan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ;
5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional

Disamping menggiatkan kehidupan ekonomi, pariwisata juga menjadi pendorong dalam pengembangan seni budaya. Beberapa wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik sengaja mengunjungi suatu daerah hanya untuk menyaksikan pertunjukan seni budaya untuk ini kedatangan wisatawan biasanya bertepatan pada acara-acara kebudayaan yang diadakan di waktu-waktu tertentu. Sebagai salah satu daya tarik tujuan wisata, acara seni dipertunjukkan secara umum, seperti seni tari daerah tertentu. Keinginan wisatawan untuk menyaksikan suatu seni budaya adalah didorong oleh rasa ingin mengetahui, mengagumi atau menyelami seni budaya dari daerah yang dikunjungi. Mereka ingin melihat sesuatu yang jarang, berkepribadian asli tetapi indah. Kebutuhan ini akan mendorong pengembangan kreasi, penggalian, pemeliharaan atau pegeralan seni budaya yang baik.

Pariwisata juga bermanfaat pada pemeliharaan lingkungan. Hal ini bisa terwujud bila pembinaannya dilakukan secara baik dan seimbang. Wisatawan ingin menghindar dari suara gaduh dan kebisingan, ingin menghirup udara bersih dan segar, tidak seperti suasana kehidupan sehari-hari yang menjenuhkan. Daerah-daerah tersebut biasanya berupa pantai, gunung-gunung, pedesaan, hutan-hutan, padang-padang perburuan dan lain sebagainya. Gairah wisatawan yang demikian akan mendorong pemeliharaan lingkungan alam.

Manfaat lain dari pariwisata adalah memperluas lapangan dan kesempatan kerja. Kesempatan kerja dan kesempatan usaha tidak hanya pada sektor wisata semata, melainkan juga pada sektor-sektor yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan pengembangan industri pariwisata.

Selanjutnya pariwisata turut memperluas nilai-nilai pergaulan hidup dan pengetahuan. Hubungan-hubungan yang terjalin antara wisatawan dengan masyarakat yang dikunjunginya akan menempa nilai hidup baru. Manusia akan belajar menghargai nilai-nilai orang lain disamping nilai-nilai yang dimilikinya. Dengan demikian hal ini akan mendorong sikap toleransi dalam pergaulan yang merupakan sarana kuat dalam pembangunan bangsa.

2.1.6.3. Wisatawan

Seseorang atau kelompok yang melakukan suatu perjalanan wisata disebut dengan wisatawan (*tourist*). IUOTO (*The Internasional Union of Official Travel Organization*) menggunakan batasan mengenai wisatawan secara umum: Pengunjung (*visitor*), yaitu setiap orang yang datang ke suatu Negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah. Menurut Yoeti (1996:4), ada dua kategori mengenai sebutan pengunjung, yakni:

- d. Wisatawan (*tourist*) adalah pengunjung yang tinggal sementara, sekurangkurangnya 24 jam di suatu Negara dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan menjadi:
 4. Pesiari (*leisure*), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan olahraga.
 5. Hubungan dagang, keluarga, konferensi dan misi
- e. Pelancong (*excursionist*) adalah pengunjung sementara yang tinggal disuatu Negara yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam.

Menurut Schmoll dalam Yoeti (1996:139), dinyatakan wisatawan adalah individu atau kelompok individu yang mempertimbangkan dan merencanakan tenaga beli yang dimilikinya untuk perjalanan rekreasi dan berlibur, yang tertarik pada perjalanan pada umumnya dengan motivasi perjalanan yang pernah ia lakukan, menambah pengetahuan, tertarik oleh pelayanan yang diberikan oleh suatu daerah tujuan wisata yang dapat menarik pengunjung di masa yang akan datang

Sedangkan Ogilive dalam Yoeti (1996:141), memberi batasan wisatawan sebagai berikut: Wisatawan adalah semua orang yang memenuhi dua syarat, pertama bahwa mereka meninggalkan rumah kediamannya untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan kedua bahwa sementara mereka pergi, mereka mengeluarkan uang di tempat yang mereka kunjungi tidak dengan mencari nafkah di tempat tersebut.

Dari berbagai batasan pengertian tentang wisatawan di atas, dapat disimpulkan bahwa wisatawan adalah setiap orang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu dengan tujuan untuk menikmati hal-hal baru dari perjalanannya.

2.1.7. Pembangunan Pariwisata

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010-2025 pada Pasal 1 Ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa

1. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
2. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Pariwisata adalah Suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari Sarana-Prasarana, Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya.

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kepribadian dan kemampuan manusia dan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global, (Muljadi:2009:30). Pengembangan pariwisata dalam negeri telah diarahkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, memperkenalkan peninggalan sejarah, keindahan alam termasuk keindahan bahari, (Muljadi:2009:31)

Menurut Muljadi (2009:32), dalam mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan juga harus memperhatikan nilai-nilai budaya bangsa yang menuju ke arah kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan dan ketertiban umum guna memperkokoh jati diri bangsa dan dalam rangka perwujudan wawasan nusantara, karena itu, untuk mewujudkan pembangunan pariwisata harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
2. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
4. Kelanjutan dari usaha pariwisata itu sendiri.

Dalam pengembangan destinasi pariwisata diperlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan harus menggabungkan beberapa aspek

penunjang kebijakan kesuksesan pariwisata, aspek-aspek tersebut adalah pengembangan fasilitas, pengembangan sumberdaya manusia, meningkatkan aktifitas pemasaran, kualitas lingkungan hidup, aksesibilitas dan transportasi, (Liu:1994:18)

Menurut Kusudianto (1996:21), pengembangan suatu destinasi wisata meliputi sebagian besar dari sumber daya fisik atau komponen produk wisata. Yang tidak kalah penting adalah analisis para pengunjung, kebijaksanaan harga, destinasi saingan dan aspek finansial yang menentukan kelayakan ekonomi dan pengembangan. Aspek lingkungan, budaya dan sosial memiliki dimensi penting dalam pengembangan suatu destinasi. Suatu rencana fisik kepariwisataan harus terintegrasi dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dari suatu daerah.

Tujuan dari pembangunan pariwisata berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 pada pasal 2, ayat 6 adalah mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional, meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab, serta mengembangkan kelembagaankepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pembangunan pariwisata juga termasuk dalam hal pembangunan kelembagaan kepariwisataan, yaitu upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk

mendukung dan meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata. Upaya pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi : penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata, dan penyelenggaraan penelitian dan penyelenggaraan.

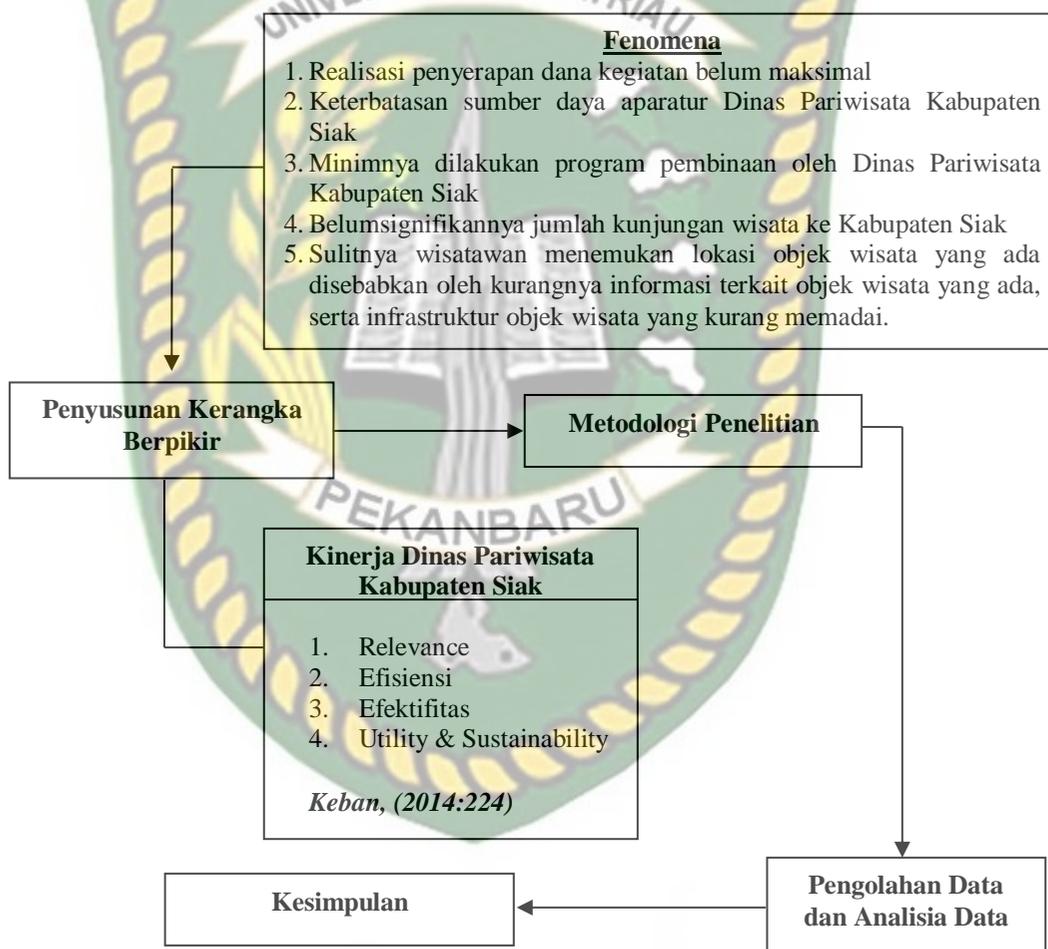
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan pariwisata merupakan upaya yang dilakukan secara terus menerus kearah yang lebih baik yang dilakukan secara terpadu yang menyangkut seluruh komponen pariwisata, yaitu hal-hal yang menyangkut pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.



2.2. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Siak. Dengan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran Penelitian Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak



Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian mengenai analisis kinerja Dinas Pariwisata dalam pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Siak ini akan dijelaskan seperti pada tabel 2.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No 1	Nama Jurnal 2	Variabel 3	Hasil 4
1.	Analisis Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata Karimunjawa <i>Oleh: Sella Rizky Asilya, dkk. 2018. Jurnal Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro</i>	Kinerja Organisasi	Berdasarkan hasil diketahui bahwa: Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dari ketidakefektifan organisasi dalam mencapai kinerja dilihat dari aspek-aspek yang diteliti yaitu produktivitas, kualitas layanan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Faktor yang mempengaruhi Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara adalah Sumberdaya manusia dan Sarana Prasarana. Namun hal tersebut juga belum dijalankan secara optimal. Dalam segi sumberdaya manusia dapat dilihat dari jumlah pegawai yang masih kurang dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Dalam sarana dan prasarana masih banyak yang belum terpenuhi.
2.	Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Menjaga Eksistensi Nilai budaya di Kabupaten Halmahera Utara <i>Oleh: Fridolin Wisora Balida. 2017. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT</i>	Kinerja Organisasi	Berdasarkan hasil diketahui bahwa: 1. Produktivitas, DISPARBUD belum melaksanakan fungsinya dengan baik disebabkan oleh kurangnya kerja sama antar instansi terkait serta lembaga-lembaga pendidikan. 2. Kualitas Pelayanan belum maksimal, hal ini mampu dilihat dari kurangnya sosialisasi program kerja ditingkat kecamatan sampai di tingkat desa, serta lemahnya kesadaran mengenai tugas dan tanggung jawab dari DISPARBUD masih sangat kurang. 3. Responsivitas DISPARBUD belum peka dalam menjaga eksistensi kebudayaan. Akibatnya banyak pengaruh budaya asing yang menyebabkan masyarakat di daerah perkotaan sudah tidak lagi menjadikan adat budaya sebagai panutan dalam hidup. Ini bisa dilihat dari terkikisnya nilai-nilai dasar budaya bergotong royong, serta pelestarian bahasa sudah terkikis. 4. Tanggung jawab kinerja DISPARBUD kabupaten Halmahera Utara belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari DISPARBUD

1	2	3	4
3.	<p>Analisis Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah <i>Oleh: Agahari Abadi Sianipar, dkk. 2015. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro</i></p>	Kinerja Organisasi	<p>Berdasarkan hasil diketahui bahwa: Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah belum optimal. Dibuktikan dari ke tidak optimalan organisasi dalam mencapai kinerja pada indikator-indikator yang diteliti yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan kemandirian. Faktor Pendukung kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah gaji dan fasilitas kerja, sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah lingkungan kerja yang tidak mendukung proses pekerjaan, latar belakan dan tingkat pendidikan yang masih rendah dan tidak sesuai dengan kompetensi, pengalaman kerja yang tidak optimal mendukung kemampuan pegawai, serta pengetahuan dan keterampilan pegawai yang masih rendah di dalam menggunakan teknologi dan melaksanakan pekerjaannya</p>
4..	<p>Kinerja Dinas Pariwisata Bali Berdasarkan Konsep Value For Money. <i>Oleh: Putu Dewi Suryantari, dkk. 2016. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.2. November (2016): 1635-1666. ISSN: 2302-8556</i></p>	Value For Money	<p>Berdasarkan pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Bali tahun 2015 dengan menggunakan konsep <i>value for money</i> yang dinilai dari aspek ekonomi, aspek efisiensi dan aspek efektivitas berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap tujuh program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2015 maka dapat di simpulkan: (1) Dinas Pariwisata Bali berdasarkan aspek ekonomi menunjukkan kinerjanya berjalan dengan ekonomis. Program pengembangan pemasaran pariwisata sebagai program dengan penghematan anggaran. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur merupakan program dengan penghematan terkecil yaitu menghemat anggaran, (2) Rasio efisiensi rata-rata diatas 100%. Yang tertinggi adalah program pengembangan destinasi pariwisata sebagai program dengan tingkat efisiensi yaitu 144,9%, (3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebagai program dengan efektivitas tertinggi. Namun ada satu program yang dijalankan tidak efektif yaitu program pengembangan destinasi pariwisata.</p>
5.	<p>Kinerja Sumberdaya Manusia Dalam Pengelolaan Objek Pariwisata di Tawangmangu <i>Reka Fajar P.S, dkk, 2018. Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Slamet Riyadi Surakarta SIRPA 201</i></p>	Kinerja Sumberdaya Manusia	<p>Pariwisata merupakan seseorang dapat melakukan pelancongan atau perjalanan sesuai dengan persyaratan-persyaratan tersebut di atas, baik di dalam negeri (tanpa menyebrang batas wilayah negara), atau keluar negara dimana dia bertempat tinggal. Faktor fisik dan faktor non-fisik merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan kinerja sumber daya manusia. Dalam pengelolaan objek wisata Grojogan Sewu masyarakat sebagai pelaku sumber daya manusia sangat penting kemajuan objek wisata tersebut. Hal itu, dikarenakan masyarakat berkontribusi dalam mengelola air terjun Grojogan Sewu..</p>

1	2	3	4
6.	<p>Evaluasi Kinerja Pengelolaan Obyek Wisata Pantai di DIY <i>Oleh: Teguh Budi Prasetya, dkk. 2015. Jurnal Maksipreneur, Vol.V, No. 1, Desember 2015 Hal. 134 – 159</i></p>	<p>Kinerja Organisasi</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan potensi yang begitu besar, Pantai-Wisata dapat dianggap sebagai masa depan baru untuk pariwisata industri di DIY. Karakter pantai yang eksotis dan tidak banyak dieksploitasi mengiringi pembukaan Jalur Lintas Selatan yang mengakibatkan Wisata Pantai di provinsi ini memiliki masa depan yang sangat cerah. Pengembangan wisata pantai, terutama di kawasan karst Gunung Kidul akan menjadi area pertumbuhan utama dalam perekonomian kawasan. Masalahnya, pengelolaan destinasi wisata pantai yang ada masih sangat buruk. Wisata pantai masih cenderung semrawut, mahal, kotor dan memperburuk ekspansi "pedagang asong" ke daerah pantai yang cenderung mengganggu kenyamanan wisatawan. Akhirnya resor pantai jauh dari ramah bagi wisatawan. Kondisi ini diyakini, tidak lepas dari kegagalan model manajemen dalam mengendalikan pelaku wisata pantai. Penelitian ini umumnya ingin merumuskan model pengelolaan partisipatif wisata pantai di DIY dan dapat dimasukkan ke dalam wisata wisata pantai yang menampilkan sektor DIY.</p>
7..	<p>Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Punten di Desa Minanga Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara <i>Oleh: Retno Pinoke. 2018. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 2 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi</i></p>	<p>Kinerja Organisasi</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana untuk pengelolaan dan pengembangan pulau punten belum optimal, karena anggaran yang diperlukan masih sangat kurang. 2. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah cukup baik karena para pegawai melakukan pelayanan yang cukup baik ketika masyarakat menghimpun informasi di dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara. 3. Kepekaan organisasi pemerintah untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau pengunjung (wisatawan) belum optimal karena sarana dan prasarana belum tersedia dalam mendukung kegiatan wisatawan. 4. Dalam pelaksanaan kegiatan di dinas kebudayaan dan pariwisata disimpulkan cukup baik karena semua pegawai saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama. <p>Untuk itu diharapkan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata untuk meningkatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dalam mengupayakan sumber dana melalui APBD. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar lebih peka lagi untuk menyediakan sarana dan prasarana yang merupakan kebutuhan pengunjung. Untuk mengoptimalkan penerimaan PAD, maka Pemerintah Daerah disarankan agar berupaya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah potensial, seperti objek-objek wisata baru yang belum optimal di kelola.</p>

1	2	3	4
8.	Analisis Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang <i>Oleh: Indah Permatasari, dkk 2017 Jurnal Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro</i>	Kinerja Organisasi	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Sumber daya manusia yang kurang memadai terdapat di obyek wisata Kampoeng Wisata Taman Lele dan Taman Margaraya Tinjomoyo; 2) Infrastuktur kurang memadai terdapat di obyek wisata Goa Kreo, Kampoeng Wisata Taman Lele dan Taman Margasatwa Mangkang; 3) Tidak adanya jalinan kerjasama dengan pihak lain di obyek wisata Goa Kreo dan Kampoeng Wisata Taman Lele.
9.	Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Dugong Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan <i>Oleh: Firmansyah, dkk. 2018. Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji</i>	Pengembangan	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Dalam mengembangkan Pantai Dugong Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan menjadikan Pantai Dugong sebagai kawasan wisata terbuka bagi semua kalangan. Potensi yang di kembangkan yaitu pantai dan lautnya serta penataan dan pembangunan failitas-fasilitas dikawasan wisata Pantai Dugong. Dalam meningkatkan kepuasan wisatawan, pelayanan masih kurang memadai serta dari segi keamanan masih sangat kurang karena di sana tidak ada tempat penitipan barang jadi ketika wisatawan melakukan aktifitas di pantai kebanyakan wisatawan meninggalkan barangnya di pondok-pondok atau di geletakkan di pasir,serta dari pihak kepolisian melakukan patroli hanya sesekali dan SAR yang bertugas di Pantai Dugong hanya pada hari-hari besar saja padahal kecelakaan bisa terjadi kapan saja.
10.	Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung <i>Oleh: A. A. Sagung Ayu Srikandi Putri. 2012. Jurnal Forum Manajemen, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2012</i>	Kinerja	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: a. Pelaksanaan kegiatan tahun 2008 sudah sesuai dengan yang direncanakan b. Pencapaian sasaran malalui penetapan indikator sasaran menunjukkan 8 indikator sasaran tingkat capaiannya melebihi target dan 8 indikaor sasaran tingkat capaiannya sama dengan target c. Rata-rata tingkat capaian sasaran melalui penetapan indikator sasaran adalah 110 persen dan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung adalah 100 persen.

Sumber: Dari Berbagai Jurnal

2.4.Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan penelitian terhadap faktor atau variabel yang digunakan ada dalam objek penelitian. Jadi untuk lebih memudahkan dalam menganalisa serta memperjelas arah penelitian ini, maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang digunakan sehingga

nantinya memberikan suatu kebenaran. Adapun yang dijadikan sebagai konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja adalah efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.
2. Kinerja Organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi berkaitan sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Adapun kinerja organisasi Dinas yang dijadikan analisis kajian dalam penelitian ini antara lain adalah:
 - a. *Relevance*, yaitu mengukur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan
 - b. Efisiensi, yaitu konversi input menjadi output
 - c. Efektivitas, yaitu tingkat kesesuaian antara hasil (*Intermediate outcome*) akan pengaruhnya (*Final outcomes*)
 - d. *Utility* dan *Sustainability*, digunakan untuk mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan pengaruhnya (*impact*).
3. Pengelolaan adalah suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain, atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

2.5.Operasional Variabel

Operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.3. Operasionalisasi Variabel

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item Penilaian 4
<p>Kinerja Adalah efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.</p> <p>Pasolong (2010:176),</p>	<p>Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak</p>	<p>1. <i>Relevance</i></p> <p>2. Efisiensi</p> <p>3. Efektivitas</p> <p>4. <i>Utility dan Sustainability</i></p>	<p>a. Keterkaitan antara perencanaan program dinas kegiatan dengan pengelolaan pariwisata</p> <p>b. Keterkaitan antara kebutuhan dan tujuan penyelengaran kegiatan pengelolaan pariwisata</p> <p>c. Kesesuaian antara perencanaan dan target pembangunan pariwisata</p> <p>a. Kreatifitas organisasi dinas dalam menciptakan produk-produk pariwisata</p> <p>b. Efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p>c. Efisiensi penggunaan sarana-prasaran dinas dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p>a. Peningkatan dalam pertumbuhan kepariwisataan</p> <p>b. Ketepatan hasil sesuai dengan harapan dan perencanaan</p> <p>c. Manfaat yang diperoleh dalam setiap pelaksanaan program pariwisata</p> <p>a. Dampak pelaksanaan program terhadap organisasi</p> <p>b. Dampak pelaksanaan program terhadap masyarakat</p> <p>c. Dampak pelaksanaan program terhadap wisatawan</p>

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

1. Pendekatan Kualitatif
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Gunawan (2013:80), Pendekatan penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
2. Penelitian Deskriptif
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau, (Lexy:2011:14). Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk memaparkan suatu gejala ataupun keadaan secara sistematis sehingga objek penelitian menjadi jelas.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dan lokasi onjek wisata yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Siak. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Siak, dan pada objek wisata yang ada, peneliti dapat melakukan interaksi baik terhadap masyarakat sekitar objek wisata ataupun wisatawan yang datang berkunjung ke lokasi tersebut.

3.3 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2002:90), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual.

Menurut Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu : 1) Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun Informan penelitian yang akan memberikan keterangan melalui wawancara mendalam dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Informan Kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- b. Informan Utama, mereka yang dapat memberi informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan tambahan penelitian ini adalah: Masyarakat Kecamatan Siak, pengelola objek wisata di Kecamatan Siak serta tokoh masyarakat Kecamatan Siak, Pengelola objek wisata di Kecamatan Siak, Tokoh masyarakat Kecamatan Siak dan wisatawan yang datang berkunjung.

Adapun kriteria informan penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 3.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Kunci	1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak	1 Orang
		2. Sekretaris Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten	1 Orang
		3. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	1 Orang
		4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Orang
		5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Orang
Jumlah Informan Kunci			5 orang
2.	Informan Utama	1. Masyarakat Kecamatan Siak	2 Orang
		2. Pengelola objek wisata di Kecamatan Siak	2 Orang
		3. Tokoh masyarakat Kecamatan Siak	2 Orang
		4. Wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata Kabupaten Siak	2 Orang
Total Informan Penelitian			13 Orang

Sumber : Olahan Peneliti 2019

3.4 Teknik Penarikan Informan

Teknik penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan metoda *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, Sugiyono (2013:125). Begitu seterusnya sehingga sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding makin lama semakin membesar.

Kebutuhan informan dalam penelitian ini didasari pada informan yang memahami atau mengetahui tentang Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak.

3.5 Instrument Penelitian

Dalam penelitian, ini instrumen penelitian yang utama adalah penulis sendiri. Sebagai mana yang di ungkapkan oleh usman bahwa alat pengumpulan data atau instrument penelitian utama dalam metode kualitatif adalah si peneliti sendiri, jadi peneliti merupakan *key instrument*, dalam mengumpulkan data si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif (Iskandar:2009:11). Selain penulis sendiri yang menjadi istrument utama dalam penelitian ini, instrument pendukung lainnya yang juga digunakan yaitu berupa pedoman wawancara mendalam yang akan dilakukan terhadap informan penelitian.

3.6 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak.

- 1). Data Primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara pelitian secara *face to face* (tatap muka) mengenai Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak. Data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan permasalahan

terkait dengan Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak.

- b). Data Sekunder; adalah merupakan data yang didapat dari berbagai sumber dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak berupa dokumen, jurnal, catatan buku arsip yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2010:253) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara.

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada seting alamiah dengan sumber data primer dan dengan cara, dokumentasi, dan wawancara. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara

Wawancara terhadap informan dilakukan dengan semi terstruktur (*semistructure interview*), dimana dalam pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka, bebas tetapi masih berpedoman pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, cerita, biografi, monografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk dokumen tulisan yang berupa monografi, peraturan dan kebijakan pemerintah terkait Kepariwisata serta sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Siak pada umumnya dan Kecamatan Siak khususnya

3. Teknik Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang didasari oleh kegiatan-kegiatan pemilihan, perubahan, pencatatan dan pengkodean terhadap serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme individu (naturalistik), sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Penulis melakukan observasi langsung di tempat penelitian tetapi bersifat observasi non participant dimana penulis hanya mengamati tetapi tidak ikut serta dalam semua aktivitas tersebut.

3.7 Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Model pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model Interactive dari Miles and Huberman yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data yaitu merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi maupun dengan menggunakan angket. Semakin banyak data yang terkumpul, maka hasil penelitian yang didapat semakin bagus.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka data perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian data dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data berikutnya jika diperlukan. Data-data yang tidak terpakai dibuang, sehingga peneliti lebih fokus pada data yang telah tereduksi.

c. *Data display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data dapat dalam bentuk tabel, grafik, chart dan sejenisnya. Melalui penyajian data dalam bentuk display, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Display data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan *flowchart*. Penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

d. *Verifying* (Verifikasi)

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi yaitu memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang berada di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

3.8 Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakuka melalaui uji terhadap kredebilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, yaitu dengan teknik triangulasi. Sebagaimana pendapat Wiersman yang dikutip oleh Sugioyono (2010:53-54) menyatakan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data dari dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalaui beberapa informan penelitian. Kemudian, triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada informan penelitian yang sama dengan teknik yang berbeda , yaitu melalui wawancara kemudian di cek dengan observasi dan dokumen yang ada.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Siak

4.1.1. Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buntan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buntan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 – 1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

Kabupaten Siak yang beribu kota di Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 1999. Pemekaran Kabupaten Siak bersamaan dengan 7 Kabupaten lainnya di Provinsi Riau didasarkan pada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Siak terdiri atas 14 Kecamatan, 9 kelurahan dan 122 desa.

Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 Km² yang terdiri dari 14 kecamatan, 9 kelurahan, 114 kampung, dan 8 kampung adat, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis.

4.1.2. Visi, Misi, Dan Tujuan Kabupaten Siak

Dalam suatu institusi pemerintahan modern, perumusan visi dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting mengingat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, peradaban masyarakat dan arus globalisasi, yang pada intinya telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Melalui perumusan visi, masyarakat akan dapat mengetahui seberapa jauh komitmen dan strategi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pembangun pada berbagai aspek kehidupan di masa yang akan datang, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan untuk memilih strategi dan kebijakan dalam rangka memanfaatkan peluang sekaligus dapat mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan dan perubahan peradaban dunia.

Visi dan Misi jangka panjang dua puluh tahun kedepan Kabupaten Siak telah disepakati dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Siak tahun 2005 - 2025. Visi dan Misi jangka panjang hanya dapat dicapai secara bertahap melalui beberapa ‘Visi dan Misi antara’, yakni Visi dan misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan Bupati selama periode jabatannya. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan ini, mencerminkan prioritas pembangunan Kabupaten Siak pada periode tersebut, dalam rangka mencapai Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Siak. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan ini dirumuskan berdasarkan Informasi

Teknis, yang diperoleh dan analisis kondisi umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang.

4.1.2.1 Visi Kabupaten Siak

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka Visi Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 adalah :

”Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu Serta Menjadikan Kabupaten Siak Sebagai Tujuan Pariwisata di Sumatera.”

4.1.2.2 Misi Pembangunan Kabupaten Siak

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan strategi, prioritas kebijakan, penyusunan program dan pengalokasian sumber daya daerah.

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman dan bertaqwa.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama kampung-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya.
4. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima.

4.1.2.3 Tujuan Kabupaten Siak

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan. dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan Anak Usia Dini;
3. Tercapainya sasaran pembangunan pendidikan menengah;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas keluaran pendidikan non formal;
5. Terpenuhinya rasa keadilan publik terhadap layanan pendidikan luar biasa;
6. Meningkatkan jumlah dan kualitas keluaran pendidikan tinggi;
7. Tercapainya standar mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme para pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Mewujudkan pelayanan kesehatan terjangkau dan berwawasan mutu kepada seluruh lapisan masyarakat;
9. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak-anak;
10. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan keluarga;
11. Eksistensi Budaya Melayu sebagai basis jati diri masyarakat Siak;
12. Meningkatnya kecerdasan masyarakat melalui ketersediaan bahan bacaan;
13. Terbentuknya karakter pemuda yang mandiri;
14. Meningkatnya prestasi olah raga daerah.

Misi 2: Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang berkelanjutan dan jumlah dan lama kunjungan wisatawan asing dan domestik;
2. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk **pertanian**, pendapatan petani dan ketersediaan **bahan pangan** dengan harga terjangkau;
3. Manusia sehat dan produktif;
4. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perkebunan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;

5. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk peternakan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;
6. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perikanan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;
7. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertambangan dan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
8. Meningkatkan mutu dan volume perdagangan serta memberikan perlindungan terhadap konsumen;
9. Meningkatnya mutu dan volume industri yang berdaya saing di pasaran lokal, domestik dan internasional.

Misi 3: Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sector ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Pemerataan distribusi penduduk;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan;
4. Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh sektor UMKM;
5. Pertumbuhan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas pencari kerja dan semakin terbukanya akses lapangan kerja;
7. Meningkatnya standar kesejahteraan pekerja dan pelayanan ketenagakerjaan;
8. Tercapainya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah;
9. Terpetakannya penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, profesi dan persebarannya;
10. Terwujudnya pengelolaan data informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Misi 4: Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan prasarana jalan, jembatan, dan pengelolaan sumber daya air;
2. Membangun, meningkatkan, dan pemeratakan pembangunan perumahan berkualitas baik;
3. Meningkatkan kualitas penataan ruang;

4. Meningkatkan kualitas bidang perhubungan;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan bidang pertanian;
7. Terwujudnya pembangunan daerah secara terintegrasi, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi 5: Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*), menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepada desa, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Berjalannya sistem pemerintahan yang desentralistis melalui implementasi desentralisasi politik, keuangan dan adminitrasi;
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel;
3. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kelembagaan pemerintah daerah;
4. Optimalnya pelaksanaan kebijakan otonomi Desa.

4.2 Dinas Pariwisata Kabupaten Siak

4.2.1 Gambaran Umum

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten baru di Propinsi Riau dari hasil pemekaran yang sebelumnya bagian wilayah Kabupaten Bengkalis, dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 53 Tahun 1999, pada usia yang relative sangat muda, Kabupaten ini terus berupaya mengejar kekurangan dan ketertinggalan dengan mencari rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, efisien dan efektif, dengan berbasis pada peningkatan ekonomi kerakyatan, pemerataan dan kesinambungan yang berwawasan lingkungan.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kabupaten Siak, berubah fungsi menjadi unit teknis Balai Pengkajian dan Pelatihan Dinas Kebudayaan, Kesenian dan pariwisata Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Balai Kerapatan, Istana Siak, Masjid Syahbuddin, Pentas Siak Bermadah dan Gedung Tengku Maharatu melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan inventrisasi, pengkajian, seminar dan berbagai bentuk pelatihan seni. Untuk menunjang pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Siak pemerintah Siak terus membenahi fasilitas dan sarana pendukung seperti transportasi, telekomunikasi dan perbankan.

Untuk menuju Kabupaten Siak dapat ditempuh melalui jalur sungai dan darat. Berbagai angkutan umum seperti bus, ferry atau speed boat selalu tersedia dan setia menunggu penumpang. Jalur darat dapat ditempuh melalui jalan raya yang merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas.

Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Siak yang dilaksanakan melalui program-program pengembangan kepariwisataan, perlu dicermati, diwaspadai dan diatasi pada masa depan terutama menghadapi era pasar bebas yang penuh tantangan dan harapan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 80 Tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak adalah instansi teknis yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati Siak. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok bidang Pariwisata.

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak

Visi Dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, sebagai berikut:

a. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Siak sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun 2016-2021, maka visi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Dan Berbudaya Melayu Serta Menjadikan Kabupaten Siak Sebagai Tujuan Pariwisata Di Sumatera”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, diperlukan perumusan misi yang jelas dan merupakan pernyataan tentang tujuan pembangunan jangka menengah secara terfokus dan berindikator yang jelas dan terukur. Adapun Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam upaya menunjang keberhasilan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, menarik dan bernilai jual tinggi;
2. Meningkatkan dan mengupayakan pemasaran pariwisata di tingkat Nasional maupun Internasional secara berkelanjutan;
3. Membangun dan meningkatkan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompeten dan berdaya saing.

4.2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak merupakan unsur pelaksanaan tugas yang meliputi memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Pariwisata dengan lingkup perencanaan, retribusi daerah, serta pengawasan, OPD ini dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Siak Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.

Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, yaitu:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
2. Penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mempunyai wewenang, sebagai berikut:

1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas dinas;
2. Menetapkan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
3. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Bupati dibidang Pariwisata;
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pedoman kerja dibidang Pariwisata;
5. Menyusun program kerja dan rencana sesuai dengan rencana strategis dinas;
6. Menetapkan kebutuhan anggaran bidang sebagai RKA dinas;
7. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
8. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
9. Melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran;
10. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administrative kepada Bupati terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang Pariwisata dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
11. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah langkah inovasi kepada Bupati dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan dinas;
12. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
13. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan meliputi urusan perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi Pariwisata serta pengawasan dan evaluasi sesuai fungsi SKPD;

14. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah bidang Pariwisata yang meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, retribusi daerah;
15. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan dinas dalam rangka memberi pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pariwisata Kabupaten

Siak mempunyai fungsi dan unsur – unsur organisasinya sebagai sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

- 1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata.
- 2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 - b. penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 - c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2. SEKRETARIS

- 1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - c. penyusun program dan melaporkan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 - f. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 - g. pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
 - h. penyusunan profil pendidikan dan kebudayaan;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta

bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. BIDANG DESTINASI INDUSTRI PARIWISATA

- 1) Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang;
 - b. pengordinasian program kerja masing-masing seksi;
 - c. pengordinasian para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - d. penilaian prestasi kerja bawahan;
 - e. pemberian petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; pengordinasian, pembinaan, penyusunan rencana program Penetapan dan Pengembangan Destinasi, Kawasan Strategi dan Industri Pariwisata;
 - f. pengordinasian penyusunan rencana pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata;
 - g. pelaksanaan study, pengkajian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, destinasi wisata;
 - h. pelaksanaan Pengendalian Intren; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

- 1) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemasaran Pariwisata.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang;
 - b. pengoordinasian program kerja masing-masing seksi;
 - c. pengoordinasian para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - d. penilaian prestasi kerja bawahan;
 - e. pemberian petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan;
 - f. pengoordinasian penyusunan rencana pengelolaan dan pengendalian pariwisata;
 - g. pengoordinasian penyusunan rencana Pemasaran Pariwisata;
 - h. pelaksanaan sistim pengendalian intern;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- 1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada maksud ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang dibawahinya;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang dibawahinya;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;
- d. pengumpulan data dan informasi tentang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Siak;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis kepada kabupaten dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di kabupaten/kota;
- j. pembangunan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf dan industri kreatif, baik dalam upaya peningkatan sarana produksi maupun peningkatan sumber daya manusia;

- l. pelaksanaan analisa Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf, serta memberikan dukungan dalam rangka pengembangan pasar Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- m. pemberian dukungan dan fasilitasi bagi pelaku Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- n. pengumpulan hasil-hasil karya di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan industri kreatif sebagai sumber ide kreatif di masa yang akan datang;
- o. penyusunan rencana kerja, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan bidang;
- p. pelaksanaan evaluasi kinerja bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4.2.4 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 80 Tahun 2016 Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dapat kami uraikan Struktur sebagai berikut ini :

- a. Kepala Dinas, membawah Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang diantaranya :
 1. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 2. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- b. Sekretaris; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, memberikan pelayanan administrasi

dan mengkoordinasikan perencanaan serta pengawasan antar bidang dengan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang penyiapan Destinasi dan Industri Pariwisata dengan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
1. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 2. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Pemasaran Pariwisata dengan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
1. Seksi Strategi, Komunikasi dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata; dan
 2. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang penyiapan dan Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri;
 2. Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.
- f. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 4.2
Jumlah ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Siak
berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	11 Orang
4	Pelaksana/Staf	38 Orang
5	Honorer/ PTT	85 Orang
	Jumlah	139 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Tahun 2019

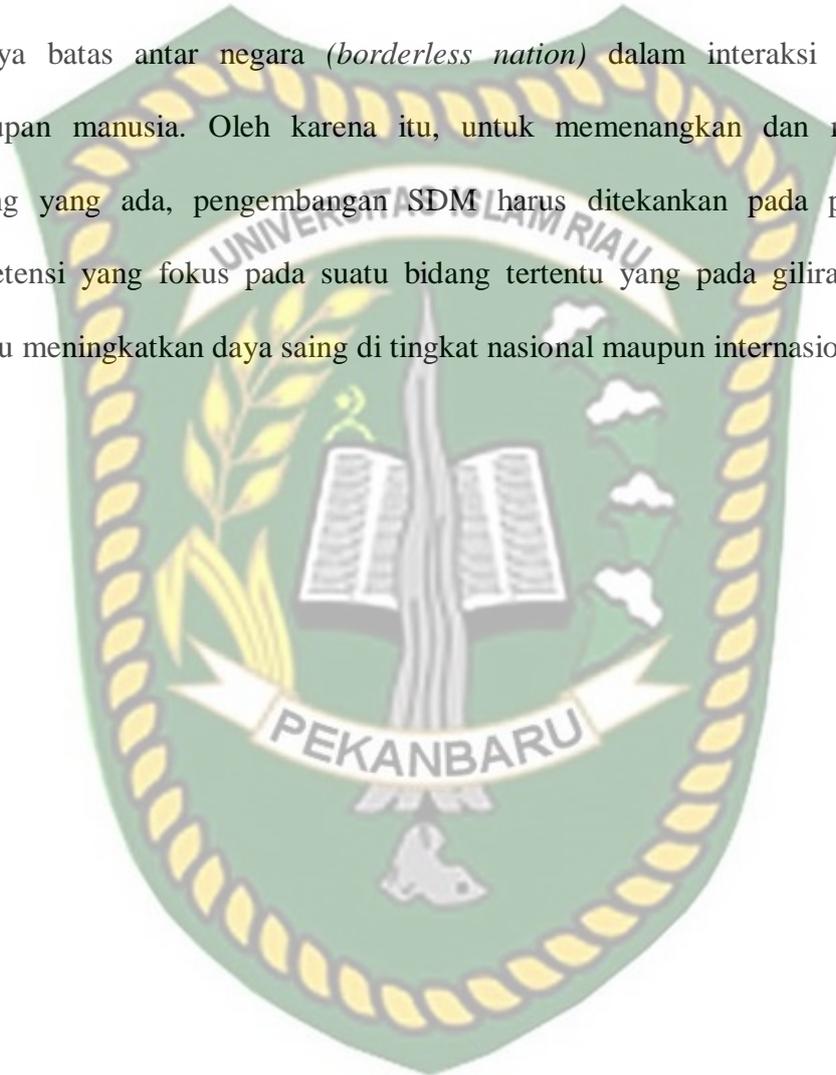
Tabel 4.3
Komposisi PNS Dinas Pariwisata berdasarkan
jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	ASN	Honorer/ Kontrak	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	8	2	10 orang
2	Strata Satu (S1)	19	35	54 orang
3	Diploma (D3)	2	8	10 orang
4	SLTA/ SMA/ SMK	20	40	60 orang
5	SLTP/ SMP	-	-	-
6	SD	5	-	5 orang
	Jumlah			139 Orang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak menghadapi beberapa keterbatasan, namun keterbatasan utama adalah kurangnya sumberdaya manusia yang ahli bidang kepariwisataan dan latar belakang pendidikan formal di bidang pariwisata.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dan strategis bagi tercapainya keberhasilan pembangunan suatu bangsa. SDM yang kuat dan berdaya saing tinggi dalam berbagai aspek akan mendukung peningkatan

pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial dan budaya. SDM yang berdaya saing tinggi merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan di era globalisasi yang diwarnai dengan semakin ketatnya persaingan serta tiadanya batas antar negara (*borderless nation*) dalam interaksi hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk memenangkan dan menangkap peluang yang ada, pengembangan SDM harus ditekankan pada penguasaan kompetensi yang fokus pada suatu bidang tertentu yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Penyajian Data Informan

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Adapun Informan Kunci dan Informan Utama dalam penelitian Kinerja Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Siak ini adalah Pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak yang keseluruhannya berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif, sedangkan Informan tambahan yaitu 8 (delapan) orang, terdiri dari Masyarakat Kecamatan Siak, Pengelola objek wisata di Kecamatan Siak, Tokoh masyarakat Kecamatan Siak dan Wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata Kabupaten Siak. Sehingga keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah 18 (delapan belas) orang.

Adapun karakteristik dari informan diidentifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

5.1.1. Jenis Kelamin

Berdasarkan identifikasi informan dari jenis kelamin, maka antara informan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berikut daftar identifikasi informan berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 5.1
Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	10 orang
2.	Perempuan	3 orang
TOTAL		13 Orang

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Oktober 2019

Jumlah informan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata, dan tokoh masyarakat. Sedangkan informan perempuan 3 (tiga) orang terdiri dari Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Pengusaha dan masyarakat.

5.1.2 Tingkat Pendidikan

Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang. Pendidikan dimiliki seseorang cenderung mempengaruhi kepribadian, kemampuan, wawasan dan pola pikir seseorang. Semakin tinggi

tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, daya iker dan wawasan yang dimilikinya. Berikut identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Tabel 5.2
Identifikasi Informan berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S3)	1 orang
2.	Pasca Sarjana (S2)	3 orang
2.	Sarjana (S1)	4 orang
3.	SLTA atau sederajat	5 orang
TOTAL		13 Orang

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Oktober 2019

Adapun tingkat pendidikan dari informan utama berpendidikan Pasca Sarjana terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Siak serta Pengusaha, informan yang berlatar belakang Sarjana berasal dari Pejabat Struktural Dinas Pariwisata terdiri dari Kepala Bidang Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dan sebagian Tokoh masyarakat serta pengusaha yaitu berjumlah 4 (empat) orang, sedangkan informan yang berlatar belakang SLTA juga berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari masyarakat dan pengunjung di Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Melihat komposisi informan berdasarkan tingkat pendidikan diatas, maka terlihat bahwa informan yang berlatar belakang Sarjana sangat mendominasi.

5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi sesuai dengan tujuan penelitian sub topik bab ini yang dilakukan oleh peneliti, mengenai Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak. Pada dasarnya berbicara mengenai kinerja, Prawirosentono dalam Pasolong (2008: 176) menjelaskan kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan sesuai dengan moral dan etika, sehingga dalam hal ini Prawirosentono menekankan kinerja yang berkaitan pada hasil. Berkaitan dengan kinerja sebagai hasil kerja dari sebuah organisasi tentu kinerja yang telah dicapai harus dilakukan pelaporan ketercapaian kinerja terhadap tujuan organisasi yang telah ditentukan yang dalam hal ini telah dituangkan pada Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Kabupaten Siak.

Tercapainya Visi tersebut hanya akan terlaksana jika Misi organisasi dijalankan dengan baik, Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak yaitu:

1. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya, kesenian tradisional dikalangan masyarakat, serta benda cagar budaya dan bangunan bersejarah. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mengembangkan kepedulian terhadap bangunan bersejarah dan meningkatkan eksplorasi berbagai kesenian dalam rangka memperkuat identitas jati diri masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas keanekaragaman obyek dan daya tarik budaya dan wisata. Meningkatkan kualitas usaha sarana dan jasa

pariwisata diarahkan pada peningkatan keanekaragaman obyek dan daya tarik budaya dan wisata. Diamati dari obyek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, yaitu “wisata Tasik Naga Sakti di Kecamatan Sungai Apit” adanya sarana, prasarana dan penyediaan jasa untuk berwisata belum optimal. Ini terbukti bahwa obyek wisata tersebut kurang diminati wisatawan karena sarana dan prasarana kurang memuaskan wisatawan, bahkan tidak ada ditemukan petugas penjaga dan juga pagar jalan masuk kelokasi tersebut tertutup.

3. Meningkatkan kualitas sarana dan jasa, budaya dan pariwisata dengan memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama antar pelaku budaya dan pariwisata. Terwujudnya kerjasama yang lebih terpadu antar pelaku usaha, kerjasama dalam hal ini adalah berbagai pihak terutama unit kerja yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja manajemen. Kolaborasi yang sistematis dan sinergis dari berbagai unit kerja yang ada akan sangat mendukung peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Akan tetapi kondisi yang ada saat ini masih merefleksikan tidak adanya terintegrasi antarunit.
4. Dari sisi eksternal, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang mengambil peluang dalam industri pariwisata, serta masih kurangnya minat Investor untuk berinvestasi pada bidang kepariwisataan. Respon generasi muda terhadap seni tradisional yang masih cenderung pasif, dan masih terbatasnya dana untuk pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka Analisa terhadap identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi diuraikan untuk bidang Pariwisata sebagaimana berikut:

1. Rendahnya Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata;
2. Lemahnya / Belum Efisien Pemasaran, Promosi Destinasi dan Industri Pariwisata;
3. Ketidaksiapan masyarakat pada daerah yang menjadi destinasi wisata/ Pemberdayaan masyarakat di daerah destinasi belum optimal.
4. Ketidaksiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur destinasi/Ketersediaan dan konektivitas infrastruktur destinasi dan rendahnya nilai, jumlah dan pertumbuhan investasi, serta iklim usaha yang tidak kondusif.
5. Belum optimalnya kesiapan masyarakat disekitar destinasi pariwisata dalam penerapan sapta pesona dan sadar wisata.
6. Belum optimalnya peranan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai bidang / fungsi dalam pengembangan kepariwisataan, sebagai contoh dalam hal:
 - a. Produk pariwisata terlihat pada pengembangan dan pengelolaan objek wisata alam, budaya dan buatan serta Perencanaan dan pengembangan pariwisata daerah.
 - b. Aksesibilitas, seperti: Membangun prasarana jalan, Menangani ketertiban dan pengembangan sarana transportasi.
 - c. Pengelolaan SDM, meliputi: Pembinaan/penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona dan Meningkatkan SDM.
 - d. Amenitas/fasilitas, seperti: Perizinan usaha pariwisata, Menangani standart sanitasi dan higienis, restoran, rumah makan, kios makanan.

Dengan mengadopsi teori dari Menurut Pollit dalam Keban, (2014:224) dengan indikator parameter penilaian kinerja terdiri atas *relevansi*, *efisiensi*, *efektivitas* serta *Utility dan Sustainability*. Berkenaan dengan keempat indikator

tersebut, akan dijelaskan berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Untuk mengetahui tanggapan informan peneliti tentang indikator-indikator Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak yaitu, peneliti memberikan pertanyaan kepada informan kunci dan informan utama.

Dari hasil observasi yang dilakukan, identifikasi yang muncul dalam kaitannya dengan pelaksanaan dalam mengetahui kualitas kerja terdapat beberapa gejala yang dapat dilihat, yang pertama dari pengetahuan pegawai terhadap visi misi organisasi yang mutlak harus dipahami. Kedua pengetahuan pegawai terhadap tugas pekerjaannya sehingga kita dapat menyusun strategi serta memunculkan ide dan gagasan. Kemampuan pegawai melihat kekuatan dan kelemahan dari setiap tindakan yang diambil dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sebagai berikut:

1. Dilihat dari hasil penelitian terdahulu oleh Retno Pinoke (2018) tentang Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Punten di Desa Minanga Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Sumber dana untuk pengelolaan dan pengembangan pulau punten belum optimal, karena anggaran yang diperlukan masih sangat kurang, Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah cukup baik karena para pegawai melakukan pelayanan yang cukup baik ketika masyarakat menghimpun informasi di dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten

minahasa tenggara. Kepekaan organisasi pemerintah untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau pengunjung (wisatawan) belum optimal karena sarana dan prasarana belum tersedia dalam mendukung kegiatan wisatawan dan dalam pelaksanaan kegiatan di dinas kebudayaan dan pariwisata disimpulkan cukup baik karena semua pegawai saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama.

2. Dilihat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Siak berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: Kurangnya partisipasi masyarakat setempat dalam mengembangkan objek pariwisata mengakibatkan kurangnya sarana-dan saran pendukung wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan dan ini berarti bahwa keberadaan objek-objek wisata di Kabupaten Siak tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta Berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Siak dari tahun 2014- 2018 jumlah kunjungan tersebut belum memuaskan. Tentu permasalahan ini disebabkan karena belum terbenahinya permasalahan dan tertatanya sarana serta prasarana objek wisata yang ada di Kabupaten Siak.

Dalam hal ini peneliti menggali informasi responden yaitu **Informan Kunci** dan **Informan Utama** tentang bagaimana potensi kepariwisataan di Kabupaten Siak saat ini jika dibandingkan dengan potensi kepariwisataan yang ada di wilayah lainnya di Indonesia. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Informan Kunci yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Sekretaris

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, sebagai berikut:

Untuk mengetahui tanggapan informan peneliti tentang Kinerja Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak, peneliti memberikan pertanyaan kepada informan kunci dan informan utama serta informan tambahan, pengetahuan responden tentang indikator-indikator penilaian kinerja terdiri atas *relevansi, efisiensi, efektivitas serta Utility dan Sustainability.*, sebagai berikut:

5.2.1 Berdasarkan Indikator Relevansi

Kriteria pengembangan kinerja yang dapat diukur secara objektif untuk pengembangannya diperlukan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Kualifikasi penting bagi pengembangan kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif, salah satunya Relevansi, yaitu pengukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara kriteria dengan tujuan-tujuan kinerja. Misalnya kecepatan produksi bisa menjadi ukuran kinerja yang lebih relevan jika dibandingkan dengan penampilan seseorang. Adapun item penilaian dari indikator ini meliputi: Keterkaitan antara perencanaan program dinas kegiatan dengan pengelolaan pariwisata, Keterkaitan antara kebutuhan dan tujuan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pariwisata serta Kesesuaian antara perencanaan dan target pembangunan pariwisata.

Relevansi adalah keterkaitan, hubungan atau kecocokan. Menurut Tams Jayakusuma (2001:25), hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Selain itu arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses, cara atau arahan yang menentukan atau

menggambarkan suatu obyek tertentu yang membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya.

a. Keterkaitan antara perencanaan program dinas kegiatan dengan pengelolaan pariwisata

Keterkaitan antara perencanaan program yaitu suatu kebijakan pariwisata memberikan filsafat dasar untuk pembangunan dan menentukan arah pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa depan. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tidak terlepas dari program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan kota, asosiasi maupun SKPD yang langsung ditunjuk yang sesuai dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hasil pengumpulan informasi penelitian lapangan SKPD dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat pada sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan yang disusun dengan berpedoman pada rencana strategis. RKT Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2018 memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran, program/kegiatan, serta indikator dan target kinerja program/kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Adapun RKT Dinas Pariwisata Kab.Siak Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3
Rencana Kerja Tahunan (RKT) program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak

No	Sasaran			Program	Kegiatan			
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya objek pariwisata baru sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun asing	Tersedianya tempat - tempat objek wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan	12 Objek	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Meningkatkan kebersihan situs-situs bersejarah yang menjadi tujuan wisata	Block	5
					Promosi potensi dan obyek pariwisata	Penayangan iklan pariwisata Siak di Televisi dan Juga pembuatan Film Dokudrama	Stasiun	3
					Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Kawasan Ekowisata Mempura (Jalan Akses, Pagar, Drainase)	Pembangunan Taman Burung	Bangunan	1
					Festival Siak Bermadah	Adanya Festival Siak Bermadah	Cabang	1 9
					Perencanaan Pembangunan peninggalan bersejarah	DED penataan kawasan kolam hijau dan DED Makam Buang Asmara	dokumen	2
					Pembangunan peninggalan bersejarah	Pembangunan Paving Block makam raja Kecil, dan Pembangunan Gapura Kolam Hijau	Pembangunan	2
					Jumlah Kerjasama Pariwisata yang terjalin	9 MICE	Program Pengembangan Kemitraan	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Sumber: Renstra Dinas Pariwisata 2016-2021.

Pada tabel 5.3 diatas Rencana Kerja Tahunan (RKT) program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pariwisata

Kabupaten Siak telah menetapkan 12 (dua belas) objek pariwisata baru sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun asing untuk program pengembangan Destinasi Pariwisata.

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Peneliti memberikan pertanyaan kepada **Informan Utama** dan **Informan Kunci** yaitu: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Mengenai pertanyaan tentang Keterkaitan antara perencanaan program dinas kegiatan dengan pengelolaan pariwisata, apakah pembangunan pariwisata yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Siak saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan adat budaya daerah dan juga mampu menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung? Hasil wawancara peneliti dengan Tokoh masyarakat, Bapak H. Makmur, yaitu:

“Sejauh pembagunan pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten siak sudah sesuai dengan adat budaya, hanya mungkin untuk kebutuhan masyarakat belum semua sesuai.”(wawancara tanggal 18 Oktober 2019)

Selanjutnya hal senada, juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Bapak Hamdan, ia mengatakan:

“Kalau dilihat dari jenis wisata yang ada di Kabupaten Siak, memang semua berasal dari adat istiadat dan sejarah yang ada, sehingga wisatawan sangat antusias dalam mengenal berbagai sejarah kebudayaan.” (wawancara tanggal 19 Oktober 2019)

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak bapak Fauzi Azni, beliau mengatakan:

“Potensi kepariwisataan di Kabupaten Siak yang ada saat ini cukup banyak, Siak memiliki banyak potensi wisata yang dapat dijadikan sebagai salah satu penghasil devisa bagi pemerintah maupun masyarakat setempat. Namun di antara berbagai potensi wisata tersebut, potensi wisata yang paling banyak dikunjungi atau digemari wisatawan adalah Istana Siak Asserayah Al Hasyimiah, sejauh ini dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Siak cukup banyak dikunjungi wisatawan”. (wawancara tanggal 16 Oktober 2019)

Pertanyaan selanjutnya dari keseluruhan potensi wisata yang ada di Kabupaten Siak, potensi wisata apakah yang paling potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Siak, masih hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata bapak Fauzi Azni, beliau menjelaskan:

“Seperti yang sudah saya jelaskan diatas tadi, potensi wisata yang paling banyak dikunjungi atau digemari wisatawan adalah Istana Siak Asserayah Al Hasyimiah, objek wisata istina Sika ini hamper tiap minggu penuh didatangi pengunjung”. (wawancara tanggal 16 Oktober 2019)

Perencanaan program dinas pariwisata dengan pengelolaan pariwisata dengan Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industry pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran, serta pengembangan kawasan segitiga pertumbuhan karang dunia.

b. Keterkaitan antara kebutuhan dan tujuan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pariwisata

Keterkaitan antara kebutuhan dan tujuan penyelenggaraan kegiatan pariwisata yaitu dalam rangka mempromosikan Kabupaten Siak sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman menarik serta memiliki daya saing yang tinggi serta tujuan pariwisata di sumatera dengan meningkatkan kunjungan wisatawan

mancanegara dan nusantara serta penerimaan sektor pariwisata dan Membuat pedoman umum serta pedoman pengelolaan objek wisata pantai Pangandaran yang lebih terfokus pada Manajemen Wisatawan yang meliputi interpretasi dan pengaturan pola arus pengunjung.

Mengenai pertanyaan tentang Keterkaitan antara kebutuhan dan tujuan penyelenggaraan pengelolaan pariwisata jika ada yang tidak sesuai, mengenai pembangunan kepariwisataan apakah yang lebih dibutuhkan dan mesti di kembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak selanjutnya? Hasil wawancara peneliti dengan Pengelola/ Pengusaha, Ibu Yuni, yaitu:

“Iya, saya rasa sudah cukup sesuai dengan kebutuhan saat ini, hanya saja pembangunan masih harus terus diperbarui tanpa meninggalkan sejarah dan adat istiadat setempat, misalnya di dalam tempat wisata tersedia tempat makanan dan minuman seperti café, hal itu merupakan suatu pembaharuan untuk menambah daya minta wisatawan.”(wawancara tanggal 14 Oktober 2019)

Selanjutnya, juga disampaikan oleh Pengusaha, Bapak Afrizal, ia mengatakan:

“Untuk adat istiadat dan budaya setempat sudah cukup sangat sesuai, hanya saja perlu pemeliharaan yang matang setiap tahunnya, agat objek wisata tersebut tetap dapat menarik pengunjung yang datang.” (wawancara tanggal 15 Oktober 2019)

Kemudian peneliti mencoba mewawancarai Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, mengenai Dari keseluruhan potensi wisata yang ada di Kabupaten Siak, potensi wisata apakah yang yang paling potensial untuk dikembangkan ikon wisata Kabupaten Siak, sekaligus untuk peningkatan PAD dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili disekitar objek wisata. Hasil wawancara peneliti dengan bapak Djumanotias, ia mengatakan:

“Kabupaten Siak memiliki sektor utama dalam mengembangkan pariwisata dan kebudayaan di Provinsi Riau. Kabupaten ini terkenal dengan slogan “Siak The Truly Malay” artinya melayu yang sebenarnya ada di Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak ini terdapat destinasi wisata Istana Siak Asserayah Al Hasyimiah yang merupakan Objek Wisata Unggulan di Daerah Kabupaten Siak”. (wawancara tanggal 17 Oktober 2019)

Lebih lanjut pertanyaan tentang Dinas Pariwisata Kabupaten Siak adalah instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang bertugas melakukan pengembangan dan pembangunan urusan pariwisata di Kabupaten Siak. upaya apakah yang saat ini diprioritaskan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas tersebut, bapak Djumanotias selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, ia menjelaskan:

“Adanya Peraturan Daerah kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Siak adanya Strategi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata, Program pengembangan daya tarik wisata, Program pengembangan wisata alam dan program pengelolaan lingkungan, tentukan kami akan memprioritaskan pengembangan dan pembangunan sesuai dengan program tersebut”. (wawancara tanggal 17 Oktober 2019)

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan, Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Kementerian Pariwisata disusun mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis pembangunan kepariwisataan 2015 - 2019, yang dilaksanakan mengikuti arah kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional, dan dilengkapi dengan inisiatif-inisiatif baru mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini yang dihadapi sektor pariwisata.

c. Kesesuaian antara perencanaan dan target pembangunan pariwisata

Kesesuaian antara perencanaan dan target pembangunan pariwisata dimaksud sektor pariwisata terdiri atas beberapa komponen yang berbeda yang harus benar-benar dimengerti dan direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dalam masyarakat. Segalanya untuk kenyamanan perencanaan pariwisata dalam masyarakat itu sendiri, komponen-komponen pendekatan pengembangan pariwisata.

Mengenai pertanyaan tentang Keterkaitan antara perencanaan dan target pembangunan wisata bahwa pembangunan kepariwisataan saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Berdasarkan pengamatan Bapak/Ibu, apakah sarana-prasarana kepariwisataan yang ada di Kabupaten Siak saat ini sudah memadai untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan kepariwisataan daerah Kabupaten Siak?

Hasil wawancara peneliti dengan Pengelola, Ibu Syafariah, yaitu:

“Sebagai salah satu pengelola tempat wisata di Kabupaten Siak yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah adalah sarana dan prasarana yang ada untuk dapat diperbarui lagi, kalau untuk adat istiadat Kabupaten Siak sangat terkenal dengan sejarah itu, apalagi istana Siak dan makam-makan sultan dan raja.” (wawancara tanggal 14 Oktober 2019)

Berbeda dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat juga disampaikan oleh Masyarakat Kecamatan Siak, Nadhirah, ia mengatakan:

“Saya sebagai pengunjung sangat suka dengan wisata yang ada di Kabupaten Siak ini, karena banyak mengandung sejarah serta adat istiadat yang kental sehingga dapat pembelajaran yang kita tidak tau sebelumnya.” (wawancara tanggal 13 Oktober 2019)

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Bapak Budiman mengenai pertanyaan tentang jenis

program kegiatan yang saat ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Siak, ia menjelaskan:

“Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran, serta pengembangan kawasan segitiga pertumbuhan karang dunia, melalui: (1) pemanfaatan teknologi dalam membangun infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan, (2) pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing, (3) fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata di samping penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, site plan destinasi wisata beserta rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata.” (Wawancara tanggal 18 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB).

Pertanyaan selanjutnya tentang Kendala apakah yang saat ini dialami oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam melaksanakan program tersebut, hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Bapak Budiman sebagai berikut:

“bahwa kendala yang kami alami yaitu 1) Masih kurangnya SDM sebagai tenaga pengembangan kepariwisataan. 2) Terbatasnya, sarana dan prasarana pendukung ke kawasan obyek wisata. 3) Berbagai permasalahan pelaku usaha pariwisata” (Wawancara tanggal 18 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak bahwa Kabupaten Siak memiliki sektor utama dalam mengembangkan pariwisata dan kebudayaan di Provinsi Riau. Kabupaten ini terkenal dengan slogan *“Siak The Truly Malay”* artinya melayu yang sebenarnya ada di Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak ini terdapat destinasi wisata Istana Siak Asserayah Al Hasyimiah yang merupakan Objek Wisata

Unggulan di Daerah Kabupaten Siak. Istana ini dahulunya berfungsi sebagai tempat bertugas bagi Sultan Siak melaksanakan pemerintahannya. Namun, sekarang berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda koleksi berharga peninggalan Sultan Kerajaan Siak yang dikarenakan sultan telah tiada dan tidak mempunyai keturunan lagi.

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam program kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri berhasil melaksanakan promosi pariwisata dalam event-event pariwisata di dalam dan luar negeri. Penyuluhan dan sosialisasi juga menjadi kegiatan yang penting dilakukan Dinas Pariwisata, terlihat dalam program kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Dinas Pariwisata berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kepariwisataan dan terbinanya kelompok sadar wisata. Sehingga pariwisata di Kabupaten Siak yang berlandaskan budaya tidak tergusur oleh pariwisata modern.

Mengenai Pertanyaan tentang bagaimanakah keterkaitan antara perencanaan program yang disusun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dengan kebutuhan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Siak saat ini, apakah program kerja yang telah direncanakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Siak. Dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Bapak Budiman mengenai pertanyaan tersebut diatas, bahwa:

“Keterkaitan antara perencanaan program yang disusun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dengan kebutuhan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Siak, Secara garis besar program kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten dalam kurun waktu 2017 –2021

meliputi:1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;2)Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata; 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata; 4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, disain, IPTEK, serta berbasis Seni dan Budaya; 5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;” (Wawancara tanggal 18 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB).

Pertanyaan selanjutnya masih tentang program, apakah program kerja yang telah direncanakan tersebut dapat terselenggara sepenuhnya dengan baik Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Said Muzani, ia menjelaskan:

“agar program tersebut dalam dilaksanakan dan berhasil baik, perlu dilaksanakan juga program-program pendukung, seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur”. (wawancara tanggal 19 Oktober 2019)

Pertanyaan selanjutnya masih tentang indikator relevansi yaitu mengenai keterkaitan kebutuhan dalam pembangunan pariwisata dengan hasil yang dicapai dalam penyelenggaran kegiatan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Siak saat ini, dijelaskan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arie Darmawan, dalam wawancara peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Capaian Kinerja dan Keuangan kebijakan umum pembangunan urusan Pariwisata diarahkan pada pengembangan destinasi dan industri untuk memperkuat jati diri daerah dengan Tujuan dan sasaran sebagai berikut (1) Peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara (2) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan (3) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar negeri”.(wawancara tanggal 23 Oktober 2019).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, mengenai kesesuaian antara target dan realisasi target dari pelaksanaan

pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak saat ini, bapak Djumanotias mengatakan:

“Adanya kesesuaian target dan realisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak telah menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang ingin dicapai untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Pencapaian dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan 8 indikator dan target kinerja.”. (wawancara tanggal 17 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan Kunci di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa program dan kegiatan merupakan upaya dari tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan agar kesesuaian antara target dan realisasi target dari pelaksanaan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan tersebut tentang indikator Relevansi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan pariwisata yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Siak saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan adat budaya daerah dan juga mampu menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung. Pengembangan Destinasi Pariwisata yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Siak adalah: Terwujudnya destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Strategi yang digunakan adalah akselerasi program yaitu dengan menggerakkan potensi dan penunjang kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menjadikan Kabupaten Siak mempunyai daya Tarik.

Jika dikaitkan dengan teori relevansi Menurut Gomes (2002:137), dilihat dari titik acuan penilaiannya, terdapat tiga tipe kriteria penilaian kinerja yang saling berbeda, yaitu:

1. penilaian kinerja berdasarkan hasil;
2. penilaian kinerja berdasarkan perilaku; dan
3. penilaian kinerja berdasarkan judgment (pertimbangan-pertimbangan tertentu).

Penilaian kinerja berdasarkan hasil adalah merumuskan kinerja berdasarkan pencapaian tujuan organisasi atau mengukur hasil-hasil akhir. Sasaran kinerja bisa ditetapkan oleh manajemen atau oleh kelompok kerja, tetapi jika menginginkan agar para pekerja meningkatkan produktivitasnya, maka penetapan sasaran secara partisipatif dengan melibatkan para pekerja akan jauh berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas organisasi. Penilaian kinerja berdasarkan perilaku adalah mengukur sarana pencapaian sasaran dan bukannya hasil akhir. Dalam praktek, kebanyakan pekerjaan tidak memungkinkan diberlakukannya ukuran-ukuran kinerja yang berdasarkan pada obyektifitas karena melibatkan aspek-aspek kualitatif. Penetapan sasaran secara partisipatif dengan melibatkan para pekerja akan jauh berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas organisasi. Penilaian kinerja berdasarkan pertimbangan adalah menilai dan atau mengevaluasi kinerja pekerja berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik, misalnya: jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya, luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya, keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain, kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabnya, serta hal-hal yang menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan dan integritas pribadi dan sejenaknya.

5.2.2 Berdasarkan Indikator Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Efisiensi dalam dunia perbankan adalah salah satu parameter kinerja yang sangat populer, banyak digunakan karena merupakan jawaban atas kesulitan-kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja keuangan. Adapun item penilaian dari indikator ini meliputi: Kreativitas organisasi dinas dalam menciptakan produk-produk pariwisata, Efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan Efisiensi penggunaan sarana-prasarana dinas dalam pelaksanaan kegiatan.

Peneliti memberikan pertanyaan kepada **Informan Utama** yaitu: Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.

a. Kreatifitas organisasi dinas dalam menciptakan produk pariwisata

Kreatifitas organisasi merupakan modal utama dalam menghadapi tantangan global. Bentuk-bentuk ekonomi kreatif selalu tampil dengan nilai tambah yang khas, untuk mengembangkan produk pariwisata, diperlukan sejumlah SDM yang berkualitas dengan daya inovatif dan kreativitas yang tinggi. Namun, di samping kebutuhan akan SDM yang berkualitas, pengembangan ekonomi kreatif juga membutuhkan ruang atau wadah sebagai tempat penggalian ide, berkarya, sekaligus aktualisasi diri dan ide-ide kreatif.

Mengenai pertanyaan tentang Kreatifitas organisasi dinas dalam menciptakan produk-produk pariwisata bahwa Pembangunan kepariwisataan saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Siak? Hasil wawancara peneliti dengan Tokoh masyarakat, Bapak H. Makmur, menjelaskan:

“Ada beberapa objek wisata yang saranandan prasarananya masih jauh kurang baik dan perlu di kelola secara baik oleh pemerintah setempat.”(wawancara tanggal 12 Oktober 2019)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat, Bapak Hamdan, ia mengatakan:

“Secara keseluruhan belum sangat mendukung tetapi pada objek wisata tertentu, kalau untuk objek wisata yang banyak diminati orang cukup baik.” (wawancara tanggal 13 Oktober 2019)

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Pengelola/ Pengusaha, Ibu Yuni, ia mengatakan:

“Kalau untuk objek wisata di Istana Siak sarana dan prasarana yang ada sudah cukup baik, hanya saja untuk di objek wisata lain pemerintah masih perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.” (wawancara tanggal 13 Oktober 2019)

Kabupaten Siak memiliki potensi industri kreatif besar, namun industri kreatif sebagai penggerak destinasi wisata di Kabupaten Siak masih belum dapat diimplementasikan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya linkage antara industri kreatif dan sektor wisata sebagai destinasi wisata di Kabupaten Siak, Dimana masing-masing sektor tersebut dibawah dalam pengelolaan dinas yang berbedam sehingga Industri kreatif dan sektor wisata berjalan secara terpisah, hal ini terlihat dari adanya destinasi wisata tetapi tidak adanya tempat penjualan souvenir khas daerah.

b. Efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

Efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran.

Tingkat efektivitas anggaran belanja terus berfluktuasi dari tahun ketahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan. Naik turunnya tingkat efektivitas anggaran belanja disebabkan dimana realisasi anggaran yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu pengeluaran anggaran belanja tidak tepat waktu dalam pembiayaan anggaran belanja.

Mengenai pertanyaan Efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, apakah pelaksanaan pembangunan pariwisata saat ini di Kabupaten Siak

sudah efisien jika dilihat dari program pemerintah yang saat ini dilakukan dengan manfaat yang dirasakan oleh semua pihak? Hasil wawancara peneliti dengan Pengusaha, Bapak Afrizal, menjelaskan:

“Sudah cukup efisiensi menurut saya, karena saya lihat tiap akhir pekan banyak sekali pengunjung dan wisatawan yang datang ke istana Siak.”(wawancara tanggal 12 Oktober 2019)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Pengelola, Ibu Syafariah, ia mengatakan:

“Pembangunan yang ada saat ini sudah cukup efisien, akan tetapi memang perlu penambahan agar Kabupaten Siak tetap menjadi Kabupaten yang terkenal fengan Kepariwisataannya.” (wawancara tanggal 13 Oktober 2019)

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Kecamatan Siak, Nadhirah, ia mengatakan:

“Mungkin saja sudah efisien, karena saya kurang tau program yang dijalankan pemerintah.” (wawancara tanggal 13 Oktober 2019)

Mengenai Pertanyaan tentang ketersediaan dana pelaksanaan kegiatan pembangunan pariwisata di Kabupaten Siak dengan peningkatan atau hasil pelaksanaan pembangunan pariwisata yang telah dilaksanakan selama ini. ketersediaan dana tersebut, baik dana yang berasal dari APBN ataupun APBD.

Dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Ibu Eka Susanti mengenai pertanyaan tersebut diatas, bahwa:

“ketersediaan dana pelaksanaan kegiatan pembangunan pariwisata di Kabupaten Siak lebih banyak berasal dari APBD, sedangkan APBN pernah tapi tidak tiap tahun, karena pengelolaan wisata yang ada di Siak ini memang tanggung jawab daerah yang bersangkutan;” (Wawancara tanggal 22 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB).

Pertanyaan selanjutnya masih tentang penggunaan dana, Apakah Dinas Pariwisata selaku *leading sector* pelaksanaan pembangunan pariwisata Kabupaten Siak dapat mengelola ketersediaan dana tersebut dengan baik untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan pariwisata sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Zunnadra, ia mengatakan:

“Tentu saja ketersediaan dana yang ada kita kelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam program rencana kerja Dinas Pariwisata”. (wawancara tanggal 22 Oktober 2019)

Pertanyaan selanjutnya masih tentang indikator efisiensi yaitu apakah pendanaan yang digunakan dan pelaksanaan program kerja Dinas Pariwisata Kabupaten sudah efisien dalam upaya peningkatan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Siak, dijelaskan oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif, Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Lidia Manja, dalam wawancara peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Masalah pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sudah cukup efisien, pendanaan yang ada sudah dikelola secara maksimal untuk pengembangan kepariwisataan terutama mengenai sarana dan prasarana yang ada pada objek wisata yang banyak harus dilakukan peningkatan”.(wawancara tanggal 23 Oktober 2019)

c. Efisiensi penggunaan sarana prasarana dinas dalam pelaksanaan kegiatan

Efisiensi penggunaan sarana prasarana dinas dalam pelaksanaan kegiatan merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. Input adalah segala sesuatu yang

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Output adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Yulianti, 2015:61).

Mengenai pertanyaan Efisiensi penggunaan sarana-prasaran dinas dalam pelaksanaan kegiatan, Jika masih perlu penambahan sarana-prasarana wisata, menurut pendapat Bapak/Ibu, sarana-parasarana apakah yang mesti ditambah?

Hasil wawancara peneliti dengan Wisatawan, Gustiana, menjelaskan:

“Adanya permainan anak-anak ditempat objek wisata, supaya kami yang mempunyai anak kecil, mereka tidak bosan hanya melihat sejarah-sejarah saja.”(wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Wisatawan Kecamatan Siak, Siti Aminah, ia mengatakan:

“Tempat makan dan minum perlu ditingkatkan, dibuat semacam restoran atau kafe gitu di sebelah objek wisata, pasti banyak peminat.” (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Wisatawan, Ririn Rohaniah, ia mengatakan:

“Tempat ibadah, tempat WC umum itu yang terpenting menurut saya dan tempat istirahat pengunjung (semacam pendopo gitulah).” (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Febritama Mamira, mengenai mengenai ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata di Kabupaten Siak saat ini, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata, mengatakan:

“Sejauh ini sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Siak sudah cukup memadai, akan tetapi tetap dilakukan upaya perbaikan dan penambahan bagi tempat wisata yang belum sama sekali mempunyai sarana prasarana yang menarik”. (wawancara tanggal 17 Oktober 2019)

Lebih lanjut dikatakan oleh masyarakat, Ibu Nadhirah yang berada disekitar tempat wisata mengatakan:

“Saya sebagai pengunjung sangat suka dengan wisata yang ada di Kabupaten Siak ini, karena banyak mengandung sejarah serta adat istiadat yang kental sehingga dapat pembelajaran yang kita tidak tau sebelumnya.” (Masyarakat Kecamatan Siak, Nadhirah)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan Utama di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa Masalah pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sudah cukup efisien, ketersediaan dana pelaksanaan kegiatan pembangunan pariwisata di Kabupaten Siak lebih banyak berasal dari APBD dan sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Siak sudah cukup memadai disetiap objek wisata yang ada di Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan tambahan tersebut tentang indikator Efisiensi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembangunan kepariwisataan saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak dengan cukup baik, adapun sarana-prasarana kepariwisataan yang ada di Kabupaten Siak saat ini sudah memadai untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan kepariwisataan daerah Kabupaten Siak. Kurangnya keefektifan juga tidak didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti tidak tersedianya kuliner khas Siak atau daerah aslinya, biaya kuliner yang relatif tinggi, Souvenir yang kurang kreatif dan unik yang mengkhaskan daerah aslinya, penginapan seperti hotel yang masih sering mengalami gangguan instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih

sehingga menyebabkan para calon tamu enggan untuk menginap, serta kurang terjalannya hubungan baik dengan media pers baik cetak maupun elektronik.

Jika dikaitkan dengan teori Efisiensi menurut Indra Bastian (2006:279) menyebutkan bahwa efisiensi merupakan konsep *value for money* yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya. *Value for money* tidak bisa terlepas dari tiga elemen utamanya yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang masing-masing elemen memiliki kontribusi untuk menilai kinerja organisasi sektor publik.

Dilihat dari Sektor pariwisata parameter kinerja Dinas Pariwisata secara langsung akan memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah Data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Siak Tahun 2012-2015 akan dijelaskan pada data tabel 5.4 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Siak Tahun 2013-2017

No	Tahun	Target PAD (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	%
1.	2013	120.000.000,-	140.311.000	116.93
2.	2014	125.000.000,-	136.590.000	109.27
3.	2015	130.000.000,-	133.390.000	102.61
4.	2016	135.000.000,-	116.079.000	85.98
5.	2017	135.000.000,-	92.522.000	68.53

Sumber: Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 2016-2021

Berdasarkan data pada tabel 5.4 diatas diketahui bahwa sektor pariwisata mampu berkontribusi bagi daerah terutama dalam memberikan sumbangan dana melalui retribusi daerah, terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Dilihat daru segi Ekonomi berarti cara menggunakan sesuatu hal secara

hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Ekonomi didefinisikan sebagai pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Sedangkan dari Efisiensi atau daya guna adalah bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Jadi efisiensi ini diukur dari rasio output dan cost. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standard kinerja atau target yang telah ditetapkan.

5.2.3 Berdasarkan Indikator Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan. Efektivitas dapat dikatakan sebagai tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Adapun item penilaian dari indikator ini meliputi: Peningkatan dalam pertumbuhan kepariwisataan, Ketepatan hasil sesuai dengan harapan dan perencanaan dan Manfaat yang diperoleh dalam setiap pelaksanaan program pariwisata.

Peneliti memberikan pertanyaan kepada **Informan Utama** yaitu: Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

a. Peningkatan dalam pertumbuhan kepariwisataan

Peningkatan dalam pertumbuhan kepariwisataan dimaksud adalah diarahkan untuk meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan di nusantara dengan pendekatan segmen pasar personal, segmen pasar bisnis dan pemerintah. Strategi pemasaran pariwisata nusantara mencakup peningkatan citra branding Pesona Indonesia, pengelolaan data pasar, peningkatan promosi wisata tematik dan peningkatan kerjasama promosi.

Mengenai pertanyaan Peningkatan dalam pertumbuhan kepariwisataan, apakah yang sangat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Siak dengan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Siak saat ini? Hasil wawancara peneliti dengan Tokoh masyarakat, Bapak H. Makmur, menjelaskan:

“Dengan adanya pembangunan dan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Siak tentu sedikit tidaknya dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sekitar.”(wawancara tanggal 13 Oktober 2019)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Pengelola/ Pengusaha, Ibu Yuni, ia mengatakan:

“Masyarakat merasakan bahwa dengan adanya pengembangan pariwisata setiap tahunnya di Kabupaten Siak tentu akan meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat.” (wawancara tanggal 12 Oktober 2019)

Mengenai Pertanyaan tentang Apakah pelaksanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Siak yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak saat ini sudah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak sesuai dengan target yang diharapkan.

Dijelaskan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Bapak Arie Darmawan menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Siak yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak saat ini cukup besar memberikan PAD sesuai yang ditargetkan, hal ini didapat dari banyaknya pengunjung yang setiap minggu datang ke Istina Siak.” (Wawancara tanggal 18 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB).

Pertumbuhan pariwisata dengan cara Meningkatkan promosi melalui jaringan situs online kepariwisataan daerah dengan pengembangan data dan informasi destinasi pariwisata yang dilengkapi dokumentasi dan visualisasi. Selanjutnya dengan Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kepariwisataan dengan mengembangkan SDM pariwisata berbasis kompetensi melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Penetapan strategi pencapaian kinerja pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenities, didukung oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (3A2P) guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa dari pariwisata, terutama untuk destinasi wisata prioritas.

b. Ketepatan hasil sesuai dengan harapan dan perencanaan

Ketepatan hasil sesuai dengan harapan dan perencanaan dimaksud adalah bahwa program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, dalam rangka mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Langkah yang ditempuh dengan meningkatkan jumlah sebaran informasi, promosi dan pemasaran pariwisata ke daerah dan/atau negara potensial, serta mengem-

bangkan jejaring kerjasama dengan berbagai *stakeholder*. Selain itu juga dilakukan pengembangan berbagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Siak, maupun Kampung Wisata yang berbasis komunitas/masyarakat. Penguatan sadar wisata dan sapta pesona pariwisata bagi pelaku pariwisata, pengelola destinasi wisata dan masyarakat juga terus dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan dan sadar wisata.

Mengenai pertanyaan Ketepatan hasil sesuai dengan harapan dan perencanaan, sistem pelayanan informasi kepariwisataan Kabupaten Siak ini sudah efektif diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Siak, dimana anda dapat dengan mudah mengetahui berbagai informasi yang dibutuhkan dan disaat anda berkunjung kelokasi wisata, dapat dengan mudah dijangkau dengan waktu tempuh yang singkat dan biaya perjalanan yang lebih murah dan memuaskan, jika dibandingkan dengan kondisi objek wisata di daerah lainnya yang sudah anda kunjungi? Hasil wawancara peneliti dengan Wisatawan, Gustiana, menjelaskan:

“Tya sudah cukup efektif, kalau untuk perjalanan cukup memausakan karena saya kan dari Pekanbaru, jalan menuju ke Siak sangat bagus.”(wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Wisatawan Kecamatan Siak, Siti Aminah, ia mengatakan:

“Kalau dibandingkan dengan objek wisata yang ada di Kabupaten lain, di Siak cukup efektif.” (wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Berbeda dengan hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat setempat Kecamatan Siak, Nadhira, ia mengatakan:

“Cukup efektif dan mudah dijangkau, untuk waktu tempuh tidak ada masalah, kalau dibandingkan dengan objek wisata di Kabupaten lain, di Siak cukup dengan biaya yang tidak terlalu mahal.” (wawancara tanggal 12 Oktober 2019)

Pertanyaan selanjutnya, berapa persenkah sumbangan dari sektor pariwisata Kabupaten Siak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak saat ini (Tahun 2019) Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Said Muzani, ia mengatakan:

“Tahun 2018, Dinas Pariwisata (Dispar) menargetkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pengelolaan obyek wisata sebesar Rp1,2 miliar, tentunya kami harapkan ditahun 2019 ini lebih meningkat, Tahun ini, dalam 8 bulan saja, Dispar Siak bisa mencapai target Rp1,25 miliar.”. (wawancara tanggal 19 Oktober 2019)

Ketepatan hasil sesuai dengan harapan dan perencanaan berdasarkan penguatan data dan informasi pariwisata melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha yang termasuk dalam bidang pariwisata sebagai dasar perumusan kebijakan, serta peningkatan kualitas survei profil wisatawan mancanegara untuk mengetahui pola perjalanan, pengeluaran dan umpan balik dari hasil kunjungan ke destinasi wisata.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2018 dari indikator efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Adapun item penilaian dari indikator ini meliputi: Peningkatan dalam pertumbuhan kepariwisataan, Ketepatan hasil sesuai dengan harapan dan perencanaan dan Manfaat yang diperoleh dalam setiap pelaksanaan program pariwisata. dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Adapun rincian tingkat capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5. Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkannya Promosi Pariwisata	Jumlah Wisatawan	Orang	220.000	387.038	175,93%
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	100.00%
	Jumlah PAD Retribusi Sektor	Rp.	1.000.000.000	1.486.262.000	148,63%
	Pariwisata				
	Jumlah Event	Event	13	11	84,62%
	Jumlah Promosi Pada Media Cetak	Kali	4	4	100.00%
	Jumlah Promosi Pada Media Elektronik	Kali	3	3	100.00%
	Jumlah kerjasama Pariwisata yang terjalin	Dok. Perjanjian	5	11	220.00 %
	Meningkatnya Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang baik dan berdaya Saing	Destinasi Pariwisata	5	5
Jumlah Industri Pariwisata yang baik dan berdaya Saing		Indus tri Pariwisata	10	10	100 %
Meningkatnya produktifitas dan akses ekonomi kreatif	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Sarana dan Prsara na	5	5	100 %
	% sarana dan prasarana yang dimanfaatkan	%	95%	95%	100 %
Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif baru/pemula dalam pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif baru/pemula yang dididik	Pelaku	50	50	100 %
	% pelaku usaha ekonomi kreatif/pemula yang berkreasi	%	60%	60%	100 %

Sumber: Lapid Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, 2018

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator dan

target kinerja sasaran strategis termasuk kategori capaian “baik ” artinya capaian kinerja besar sama 85%.

c. Manfaat yang diperoleh dalam setiap pelaksanaan program pariwisata

Manfaat yang diperoleh dalam setiap pelaksanaan program pariwisata yaitu pembangunan pariwisata yang tanggap terhadap minat wisatawan dan keterlibatan langsung dari masyarakat setempat dengan tetap menekankan upaya perlindungan dan pengelolaannya yang berorientasi jangka panjang. Upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan harus diarahkan agar dapat memenuhi aspek ekonomi, sosial dan estetika. sekaligus dapat menjaga keutuhan dan atau kelestarian ekologi, keanekaragaman hayati, budaya serta sistem kehidupan.

Pertanyaan selanjutnya masih tentang manfaat yang diperoleh dalam setiap pelaksanaan program pariwisata yaitu Manfaat apakah yang sangat dirasakan baik itu oleh pemerintah Daerah Kabupaten Siak ataupun masyarakat di Kabupaten Siak dengan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Siak yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak saat ini, dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eka Susanti, dalam wawancara peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Tentu banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat, salah satunya mereka bisa sekalian berdagang baik itu berbentuk oleh-oleh ataupun mereka bisa membuka kuliner dan Bagi pemerintah daerah sendiri sangat besar dalam menampah PAD daerah”.(wawancara tanggal 23 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan Kunci di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Siak yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak saat ini sudah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak sudah sesuai dengan target yang dicapai bahkan lebih, sedangkan manfaat yang didapat masyarakat dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sekitar objek wisata yang ada di Kabuaptan Siak. Sebagian besar potensi wisata yang ada di Kabupaten Siak berasal dari kekayaan budaya yang terdapat di Kecamatan Siak, sedangkan untuk potensi yang berasal dari kekayaan alam dan buatan masih sangat sedikit.

Efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, mengenai pertanyaan apakah pelaksanaan pembangunan pariwisata saat ini di Kabupaten Siak sudah efisien jika dilihat dari program pemerintah yang saat ini dilakukan dengan manfaat yang dirasakan oleh semua pihak? Hasil wawancara peneliti dengan Pengusaha, Bapak Afrizal, dalam wawancara peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Sudah cukup efisiensi menurut saya, karena saya lihat tiap akhir pekan banyak sekali pengunjung dan wisatawan yang datang ke istana Siak.”(wawancara tanggal 13 Oktober 2019)

Selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan Efisiensi penggunaan sarana-prasaran dinas dalam pelaksanaan kegiatan Jika masih perlu penambahan sarana-prasarana wisata, sarana-parasarana apakah yang mesti ditambah, Hasil Wawancara peneliti dengan wisatawan, mengatakan:

“Tempat makan dan minum perlu ditingkatkan, dibuat semacam restoran atau kafe gitu di sebelah objek wisata, pasti banyak peminat. (Wisatawan Kecamatan Siak, Siti Aminah).”(wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan utama tersebut tentang indikator Efektifitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pelayanan informasi kepariwisataan Kabupaten Siak ini sudah cukup efektif, karena mudah mengetahui berbagai informasi yang dibutuhkan dan disaat anda berkunjung kelokasi wisata dan mudah dijangkau dengan waktu tempuh yang singkat serta biaya perjalanan yang lebih murah dan memuaskan. Masyarakat merasakan bahwa dengan adanya pengembangan pariwisata setiap tahunnya di Kabupaten Siak tentu akan meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sekitarnya. Kategori Pencapaian didukung melalui kegiatan;

1. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
2. Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara didalam dan diluar negeri
3. Pengadaan bahan promosi

Data yang didapat Analisis capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak untuk tahun 2018 yang mencakup empat sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 ***Meningkatnya Promosi Pariwissata***, Sasaran ini dicapai melalui Program Pemasaran Pariwisata. Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6
Sasaran Promosi Pariwisata Kabupaten Siak

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkannya Promosi Pariwisata	Jumlah Wisatawan	Orang	220.000	387.038	175,93%
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	100.00%
	Jumlah PAD Retribusi Sektor Pariwisata	Rp.	1.000.000.000	1.486.262.000	148,63%
	Jumlah Event	Event	13	11	84,62%
	Jumlah Promosi Pada Media Cetak	Kali	4	4	100.00%
	Jumlah Promosi Pada Media Elektronick	Kali	3	3	100.00%
	Jumlah kerjasama Pariwisata yang terjalin	Dok. Perjanjian	5	11	220.00 %

Sumber: Lakip Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, 2018

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja indikator sasaran sebesar 100%. Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2018 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun 2018.

Pada Tahun anggaran 2018 berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mengelola anggaran sebesar Rp. 20.936.816.733,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.151.502.033,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 17.035.314.700,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak

Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena di satu pihak, mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien tetapi output yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan target yang diharapkan. Sedangkan di pihak lain, sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi mungkin tidak ekonomis dan efisien. Suatu program yang dilakukan secara efektif dan efisien merupakan program yang memiliki *cost-effectiveness*. Kinerja menurut Indra Bastian (2006:274) adalah "gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi perusahaan".

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Indra Bastian (2006:275) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerjanya.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Secara keseluruhan capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak pada 5 tahun terakhir dapat dilihat dari tabel 5.7 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja	Target IKU	Realisasi (Tahun)					Capaian (%)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Tersedianya tempat-tempat objek wisata yang biasa dikunjungi wisatawan	17	10	10	11	13	15	93,75%
2.	Jumlah kerjasama Pariwisata yang terjalin:							
	a. Meeting	70	40	42	45	47	48	68,57%
	b. Invitation	6	2	2	2	3	3	50,00%
	c. Conference	5	1	1	1	1	1	20,00%
	d. Event	10	1	10	12	15	18	180,00%
3.	Persentase jumlah masyarakat usaha yang menjadi wirausahaan setelah dilatih	34,00%	-	13,00%	23,00%	30,00%	34,00%	100,00%
4.	Jumlah kunjungan wisatawan	67.000	53.445	79.224	96.792	105.883	156.181	233,11%

Sumber : *Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2019*

Berdasarkan data pada tabel 5.7 diatas, mengenai capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak pada 5 tahun terakhir (2014 –2018) diketahui bahwa untuk penyediaan tempat-tempat objek wisata yang biasa dikunjungi wisatawan di wilayah Kabupaten Siak 5 tahun terakhir mencapai 93,75% ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Siak untuk melaksanakan pembangunan tempat/objek wisata di Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik. Upaya tersebut diwujudkan dengan semakin bertambahnya jumlah objek wisata di Kabupaten Siak. Begitu juga dengan pelaksanaan event wisata di Kabupaten Siak selama 5 tahun terakhir mencapai 180,00%. Hal ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan even-event wisata di Kabupaten Siak sangat memuaskan dan melebihi target yang telah dilaksanakan.

Bentuk pembangunan fasilitas pariwisata di Kabupaten Siak telah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Siak berharap potensi pariwisata sejaraha di Kabupaten Siak dapat bersaing di dunia pariwisata. Dalam pembangunan prasarana pariwisata ini diharapkan dapat meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, dan sebagainya, yang tentu saja dapat meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengambil peluang.

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Siak merupakan salah satu peluang dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata diharapkan mampu memotivasi masyarakat lokal untuk mengambi peluang sehingga perputaran ekonomi dapat lebih cepat terutama meningkatkan pelaku usaha wisata, industri kecil, dan masyarakat di daerah pada umumnya. Berjalannya kegiatan pariwisata diharapkan akan meningkatkan kerja, peluang usaha dan peningkatan pendapatan, dan juga pelestarian lingkungan, melalui kesempatan tujuan ini diharapkan akan mengurangi laju kemiskinan masyarakat dan disisi lain akan tercapai peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah.

5.2.4 Berdasarkan Indikator *Utility* dan *Sustainability*

Utility dan *Sustainability* yaitu adanya program berkelanjutan yang merupakan suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan

kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Adapun item penilaian dari indikator *Utility* dan *Sustainability* ini meliputi: Dampak pelaksanaan program terhadap organisasi, Dampak pelaksanaan program terhadap masyarakat dan Dampak pelaksanaan program terhadap wisatawan.

Peneliti memberikan pertanyaan kepada **Informan Kunci dan Informan Utama** yaitu: Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, dan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

a. Dampak pelaksanaan program terhadap organisasi

Dampak pelaksanaan program terhadap organisasi adalah Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, dapat dipastikan usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan organisasi bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan jaman. Seorang pemimpin melakukan perubahan dengan visi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tentang keadaan di masa depan yang diperkirakan akan terjadi.

Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Siak terkendala dengan belum adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Hal ini menyebabkan sinergisitas perencanaan program pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Siak dengan program pembangunan sektor lainnya menjadi tidak optimal. Disamping itu, terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak untuk sektor pariwisata.

Mengenai Pertanyaan tentang Bagaimanakah penilaian mengenai Dampak pelaksanaan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak terhadap pembangunan wilayah Kabupaten Siak? Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Bapak Fauzi Asni mengatakan bahwa:

“Dampak pembangunan pariwisata di Kabupaten Siak yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dampak akibat adanya pembangunan pariwisata yang menimbulkan akibat positif maupun negatif, sebenarnya terdapat 3 (tiga) bidang pokok yang kuat dipengaruhi yaitu ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.” (Wawancara tanggal 18 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB).

Pertanyaan selanjutnya, dampak pelaksanaan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak khususnya dari peningkatan Pendapatan, Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arie Dramawan, ia mengatakan:

“Dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dampak pelaksanaan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yaitu perkembangan pariwisata terhadap perubahan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, pola pembagian kerja, kesempatan kerja dan berusaha”. (wawancara tanggal 22 Oktober 2019)

Pertanyaan selanjutnya masih dampak yaitu dampak pelaksanaan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak terhadap Keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan pariwisata di Kabupaten Siak masa yang akan datang, dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hasil wawancara

peneliti dengan Bapak Said Muzani, dalam wawancara peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Dampak pelaksanaan pariwisata terhadap keberlanjutan pelaksanaan program dapat meningkatkan Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat. Industri pariwisata memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang sehingga pendapatan masyarakat menjadi naik menjadikan daya beli masyarakat naik sehingga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya semakin tinggi, bahkan orientasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bukan lagi kebutuhan primer ataupun sekunder, tetapi juga tersier”.(wawancara tanggal 22 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan Kunci dan Informan Utama di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa Dampak pelaksanaan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak terhadap pembangunan wilayah Kabupaten Siak adanya peningkatan Pendapatan yang sangat tinggi tetapi hanya musiman, sehingga pendapatan masyarakat naik turun Industri pariwisata adalah industri yang berbeda dari industri lain, industri pariwisata bersifat musiman atau dalam kata lain terdapat musim-musim dimana akan banyak wisatawan yang datang dan sedikit wisatawan yang datang dan Meningkatkan Pendapatan serta Daya Beli Masyarakat.

Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Siak yang dilaksanakan melalui program-program pengembangan kepariwisataan, perlu dicermati, diwaspadai dan diatasi pada masa depan terutama menghadapi era pasar bebas yang penuh tantangan dan harapan. Berikut Data PAD untuk Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Siak dilihat dari dampak pelaksanaan program objek wisata di Kabupaten Siak:

Tabel 5.8 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak Dilihat dari Pajak hotel dan Restoran

URAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	3	4	5	6	7
Hotel Bintang Dua	266,679,480.00	118,832,800.00	44,728,000.00	23,122,700.00	187,743,340.00
Hotel Melati Tiga	679,336,660.00	520,049,730.00	444,031,900.00	310,721,920.00	456,958,910.00
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kost	55,290,000.00	78,423,900.00	64,950,000.00	64,625,500.00	64,347,500.00
Restoran	5,826,089,552.00	5,648,632,447.00	4,149,422,097.60	3,735,268,761.00	4,595,764,229.74
Sirkus/Akrobat/Sulap	46,562,139.00	62,018,097.00	75,774,359.00	99,147,327.00	137,830,198.00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	134,890,000.00	119,899,000.00	91,086,000.00	598,265,000.00	1,489,282,000.00
Total	7,008,847,831.00	6,547,855,974.00	4,869,992,356.60	4,831,151,208.00	6,931,926,177.74

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, 2018.

Dari Tabel 5.7 diatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak dilihat dari Pajak hotel dan Restoran sangat besar dikarenakan sektor Kepariwisata akan tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan Destinasi, Industri, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Keratif.

b. Dampak pelaksanaan program terhadap Masyarakat dan Wisatawan

Dilihat dari dampak pelaksanaan program Dinas Pariwisata terhadap Masyarakat bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Siak merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui sektor Kepariwisata akan tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk

menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan Destinasi, Industri, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Keratif

Berikut Hasil wawancara peneliti dengan Informan Utama mengenai indikator efisiensi yang diwawancarai pada bulan Oktober tanggal 11-13 Oktober 2019, mengenai pertanyaan tentang dampak pelaksanaan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak khususnya dari peningkatan Pendapatan, Hasil wawancara peneliti dengan Pengusaha, Ibu Yuni, dalam wawancara peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Adanya pembangunan pariwisata membuka banyak kesempatan bekerja, hal tersebut dikarenakan industri pariwisata yang sangat kompleks menimbulkan kesempatan untuk membuat suatu usaha demi memenuhi kebutuhan pariwisata menjadi besar.”(wawancara tanggal 13 Oktober 2019)

Selanjutnya mengenai pertanyaan pelaksanaan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak terhadap peningkatan daya tarik dan minat wisatawan untuk datang berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Siak? Hasil wawancara peneliti dengan Wisatawan, Ibu Ririn Rohaniah, dalam wawancara peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Terjadinya pariwisata di Kabupaten Siak secara otomatis membuat orang-orang dari luar daerah berdatangan mengunjungi wisata tersebut. (Wisatawan, Ririn Rohaniah, wawancara tanggal 12 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan tambahan tersebut tentang indikator Efektifitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dampak pelaksanaan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak terhadap pembangunan wilayah Kabupaten Siak dilihat dari

faktor ekonomi dalam pembangunan pariwisata dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata terhadap perubahan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, pola pembagian kerja, kesempatan kerja dan berusaha

Keberlanjutan (*sustainability*) sendiri adalah sebuah pendekatan terpadu terhadap kinerja perusahaan di bidang lingkungan, sosial dan ekonomi. Kebanyakan perusahaan berpendapat bahwa *sustainability* berkaitan dengan masa depan dan bisnis berkaitan dengan masa kini, padahal *sustainability* seharusnya menjadi bagian integral dari perencanaan jangka pendek dan perancangan strategi jangka panjang sebuah perusahaan. Krisis ekonomi global telah membuat masyarakat menjadi lebih curiga terhadap perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang mengabaikan norma-norma sosial akan kehilangan niat baik dari para konsumen, pekerja dan pihak regulator (Bary dan Bouma, 2009).

Dengan adanya dampak dari keberlanjutan pembangunan pariwisata di Kabupaten Siak, dapat meningkatkan promosi tentu akan berhasil mempengaruhi minat masyarakat untuk datang berkunjung ke Istana Siak. Lebih jauh lagi, hal ini juga dapat memberikan suatu asumsi bahwa Istana Siak telah menjadi satu alternatif baru bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu luangnya, sekaligus sebagai tempat dimana mereka dapat memperoleh pengalaman baru.

Untuk mempertahankan agar wisatawan tetap datang ke Istana Siak Asserayah Al Hasyimiah. *Utility* dan *Sustainability* Istana Siak Asserayah al Hasyimiah membutuhkan strategi promosi untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan karena Istana Siak kini bukan sebagai gudang tempat menyimpan barang-barang antik tetapi pengelola Istana Siak berusaha menjadikan Istana Siak

sebagai tempat dimana pengunjung dapat merasakan suatu suasana dan pengalaman bersejarah yang berbeda, yang hanya akan mereka dapatkan jika mereka berkunjung ke Istana Siak Asserayah al Hasyimiah. Strategi promosi Istana Siak dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh Istana Siak yaitu untuk lebih meningkatkan jumlah wisatawan yang datang berkunjung dan juga mempertahankan Istana Siak di masyarakat berkaitan dengan upaya membuka akses kepada masyarakat luas untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di Istana Siak, sekaligus memenuhi kebutuhan pengunjung.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2018 terhadap empat indikator strategis, delapan indikator kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan melalui tujuh program dan tiga puluh empat kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja (PENJA) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2018 menunjukkan bahwa keseluruhan indikator dan target kinerja sasaran strategis termasuk kategori capaian “ sangat baik ”.

Hasil pencapaian kinerja terhadap empat sasaran strategis sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2018 perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan di masa yang akan datang. Adapun upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi, ekonomis, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program.

- b. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Siak digunakan untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah.
- b. Perencanaan tahunan.
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja.
- d. Pengukuran kinerja.
- e. Pelaporan kinerja.
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dilihat dari dampak kepada wisatawan, Pemerintah Kabupaten Siak bersama Kementerian Agama (Kemenag), MUI dan LAM Riau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau terus menggiatkan program wisata halal di wilayah itu. Tujuannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan saat berkunjung ke negeri Melayu yang identik dengan Islam itu. Untuk mengedepankan nilai-nilai syariah tersebut harus memenuhi sejumlah standar konsep wisata halal. Karena secara teknis proses pengecekan kehalalan produk membutuhkan biaya besar, dia berharap hal ini bisa dilakukan secara bertahap.

Hasil wawancara dengan Kadis Pariwisata Siak, Dr. Fauzi Asni, M.Si menyebutkan, Siak sebagai daerah kunjungan wisata di Riau telah menjelma menjadi destinasi favorit. Oleh karena itu, dibutuhkan kepastian pariwisata halal

sebagai jaminan bagi pelancong muslim dan wisatawan dunia. Untuk itu perlu terus dilakukan peningkatan kesadaran warga setempat terhadap pentingnya pemahaman terhadap produk non halal.

5.3. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak, dimana pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan upaya pengembangan ataupun promosi yang dilakukan untuk memasarkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Siak. Akan tetapi pengembangan yang dilakukan dalam membangun destinasi pariwisata belumlah maksimal sehingga pengembangan yang telah dilakukan masih dalam skala dan jumlah terbatas. Objek wisata yang ada di Kabupaten Siak adalah inventarisasi dari Dinas Pariwisata. Akan tetapi dari semua objek pariwisata sejarah yang ada di Kabupaten Siak hanya beberapa objek wisata yang baru di kembangkan oleh pemerintah daerah, salah satunya yaitu Istana Siak.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak, yaitu dengan melalui promosi dan melakukan berbagai iven yang telah dijadikan kegiatan tahunan oleh Dinas Pariwisata. Upaya dalam pengembangan potensi wisata di Kabupaten Siak selama ini belum maksimal dan menyeluruh, akibatnya keberadaan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Siak belum dapat dinikmati. Walaupun dalam berbagai hal masih banyak kekurangan, perkembangan kegiatan pariwisata tersebut selama ini sedikit banyak telah mendorong perkembangan ekonomi, sosial dan budaya.

Perencanaan yang terpadu untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan kepariwisataan yang cenderung bergerak cepat perlu didasari oleh data, keterangan dan fakta yang kuat seperti keindahan, kelestarian, pasar dan keseimbangan antara keaslian kawasan dengan penambahan fasilitas baru yang sesuai konteks,

Adapun faktor yang menghambat

1. Komunikasi Dalam variabel komunikasi yang terkait dalam hal ini ialah institusi pemerintah, swasta dan Masyarakat. Mekanisme sangat dibutuhkan untuk mengatur berbagai kepentingan secara operasional serta koordinasi agar memiliki efisiensi tinggi. Meningkatkan kapabilitas dan efektifitas institusi kelembagaan terhadap fungsi dan peran dalam pembangunan pariwisata khususnya wisata alam ditinjau dari aspek keterpaduan koordinasi dan interaksi yang sinergis antar stakeholder terkait. Pola pengelolaan wisata alam di kawasan wisata Tasik Naga Sakti di Kecamatan Sungai Apit memerlukan kerjasama antar pemerintah daerah maupun sektor swasta secara sinergis. *Stakeholder* yang dimaksud dalam hal ini ialah peran pihak Badan Operasi Bersama (BOB) dalam mendukung pemerintah untuk mengelola kawasan wisata dari segi sarana dan prasarana, promosi, regulasi serta keterlibatan langsung dalam menarik pengunjung.
2. Sumber Daya Diperlukan adanya sosialisasi yang lebih maksimal guna meningkatkan sumber daya manusia baik itu pada masyarakat maupun implementator. Dinas Pariwisata sebagai instansi pemerintah yang

mempunyai keterkaitan dalam mengelola pariwisata belumlah maksimal yang dapat dilihat pada pengelolaan di setiap objek wisata khususnya wisata alam. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat dan implementator. Salah satu unsur penting dalam terselenggaranya suatu program atau kegiatan adalah anggaran. Anggaran menjadi faktor penunjang segala bentuk program pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Besar kecilnya anggaran yang dimiliki tentu akan mempengaruhi efektivitas suatu program dan bisa menjadi kendala apabila anggaran yang dibutuhkan tidak sesuai.

3. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan pariwisata. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Selain tenaga kerja yang dimiliki haruslah kompeten, sarana dan prasarana untuk menunjang kerja haruslah diperhatikan.

Jumlah anggaran yang tersebut tergolong besar, seharusnya dapat meningkatkan kualitas pariwisata yang ada di Kabupaten Siak, terutama wisata alam yang baru mau di bangkitkan. Jika dilihat dari jumlah dana yang di kelola oleh Bidang Pariwisata diatas seharusnya Pemerintah Kabupaten Siak sangat mampu untuk melakukan pengembangan, penambahan dan pembaharuan wisata, namun pada pengerjaannya belum memadai untuk di sektor pariwisata alam.

Karena beberapa tahun terakhir lebih terfokus ke wisata sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Siak.

Kurangnya fasilitas yang ada di objek wisata sangatlah berpengaruh terhadap jumlah kunjungan, untuk menjadikan suatu daerah tujuan wisata tugas yang paling penting yaitu memfasilitasi objek wisata beserta sarana dan prasarana untuk memanjakan wisatawan. Apabila fasilitas sudah terpenuhi, sudah jelas wisatawan akan meningkat dan memberikan kontribusi yang baik terhadap pemasukan daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tidak akan dapat terlepas dari permasalahan dan isu yang berkembang secara dinamis dalam pengembangan pariwisata di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Permasalahan dan isu yang berkembang dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terkait dengan urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya minat dan kepedulian generasi muda terhadap seni dan budaya tradisional sehingga sulit untuk menelurkan generasi penerus;
2. Kurang optimalnya kepedulian masyarakat terhadap seni dan budaya daerah;
3. Masih minimnya obyek atau destinasi pariwisata yang memiliki nilai jual;
4. Fasilitas dan kualitas sarana prasarana di obyek wisata yang terbatas;
5. Belum optimalnya pengelolaan Siak sebagai kota MICE;
6. Kurang efektifnya koordinasi antar asosiasi pelaku pariwisata;
7. Belum terbangunnya jejaring kepariwisataan dengan *stakeholder* maupun dengan wilayah lain;
8. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepariwisataan;
9. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaku kepariwisataan;

10. Kurangnya kontribusi sektor kepariwisataan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah :

1. Berupaya menumbuhkan minat generasi muda melalui pengembangan atraksi seni dan budaya tradisi secara kreatif;
2. Mengembangkan dan melestarikan keragaman dan kekayaan seni budaya sebagai daya tarik wisata;
3. Meningkatkan fasilitas dan kualitas sarana prasarana di obyek wisata serta meningkatkan pembinaan pelayanan kepada para pengelola obyek wisata;
4. Mendorong pelaksanaan kegiatan gathering dan pameran tingkat nasional maupun internasional di Kabupaten Siak;
5. Mengoptimalkan kegiatan promosi dan publikasi mengenai potensi MICE (*Meeting Incentive Conference Exhibition*) di Kabupaten Siak;
6. Meningkatkan koordinasi intensif antara pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah serta antar pelaku usaha pariwisata melalui fasilitasi kepariwisataan;
7. Memperbanyak acara formal dan informal yang memberikan kesempatan interaksi diantara pelaku usaha pariwisata;
8. Meningkatkan sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat dan meningkatkan pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
9. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian Analisis Kinerja Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan umum berdasarkan Indikator Kinerja terdiri dari *Relevance, Efisiensi, Efektifitas serta Utility dan Sustainability* bahwa, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak “cukup baik”. Kinerja Dinas Pariwisata sebagai Pengelolaan Pariwisata yaitu : Dari indikator *relevance* kinerja Dinas Pariwisata hampir seluruh perencanaan rencana kerja tercapai sesuai target khususnya di sektor pemasaran atau promosi pariwisata. Tetapi belum terlaksana dalam pembangunan infrastruktur di wisata Tasik Naga Sakti di Kecamatan Sungai Apit. Dinas Pariwisata dianggap sudah cukup *efisien* dalam menggunakan dana anggaran yang besar serta memaksimalkan keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang layak terhadap pembangunan objek wisata selain daripada Istana Siak meskipun belum optimal. Dilihat dari segi *efektivitas* kinerja Dinas Pariwisata tidak ada peningkatan dalam pembangunan, tetapi pemerintah mempermudah perizinan pendirian cottage dan memperpanjang masa perizinannya menjadi 3 tahun. Manfaat yang dirasakan setelah adanya program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dianggap berdampak bagi masyarakat sekitar dan pengunjung, meskipun

keberlanjutannya terlihat jelas dengan berbagai macam koordinasi yang telah dirancang untuk kegiatan dikemudian hari.

2. Faktor yang Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Siak yaitu meliputi Fasilitas dan kualitas sarana prasarana di obyek wisata yang terbatas, komunikasi yang mana kurangnya komunikasi ataupun sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat khususnya pengrajin untuk meningkatkan kualitas produksi, kedua sumberdaya, keterbatasan sumberdaya yang mencakup disini memiliki beberapa faktor yaitu sumberdaya manusia, fasilitas, informasi dan kewenangan dan Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaku kepariwisataan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dirumuskan beberapa saran penelitian, sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak seharusnya dapat lebih mengembangkan seluruh objek wisata sejarah yang ada di Kabupaten Siak, sehingga objek wisata yang dapat dinikmati di Kabupaten Siak tidak hanya Komplek Kerajaan Istana Siak saja..
2. Pemerintah seharusnya dapat memfasilitasi objek wisata dengan pasar souvenir sehingga dapat menjadi tempat daya tarik wisatawan untuk berkunjung dan mendapatkan cindramata yang menjadi khas Kabupaten Siak dan harus lebih meningkatkan arahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kepada Dinas Pariwisata untuk meningkatkan program pengembangan

pariwisata sejarah yang ada di Kabupaten Siak, sehingga Kabupaten Siak tetap dikenal sebagai kota Istana dengan berbagai fakta kesejarahannya.

3. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak hendaknya melaksanakan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan pengembangan sektor pariwisata yang ada seperti : (Travel Tour, media cetak maupun media elektronik, tokoh masyarakat, pihak hotel dan pengusaha setempat)



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Budimanta, A, 2005, *Memberlanjatkan Pembangunan di Perkotaan melalui Pembangunan Berkelanjutan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Byars, L.I and Leslie W. Rue, 2006. *Human Resource Management: A Practical Approach*, Harcourt Brace, New York
- Damanik, Janianton dan Weber, Helmut. 2006. *Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi*. PUSPAR UGM dan Andi. Yogyakarta
- Dwiyanto, Agus. dkk . 2006. *Reformasi Birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University press. Yogyakarta:
- Fattah, Nanang. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan Islam*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Gibson Ivancevich. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur* . Bina Rupa Aksara. Jakarta
- Hadinoto, Kusadianto, 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta:
- Hamim Sufian, 2005. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*, UIR Press, Pekanbaru
- Herman,2009. *Pengarahannya*. Universitas Indonesia, Jakarta
- Imam Gunawan 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*: Bumi Aksara: Jakarta
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada Press, Jakarta
- J.A. Muljadi. 2009. *Keparowisataan dan Perjalanan*.PT. Raja Grafindo. Jakarta
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik :Konsep, Teori dan Isu*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta :
- Kuncoro, M, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta

- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. Sumber Daya Manusia Perusahaan. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Mahsun, Muhammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta:
- Moleong, Lexy J. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung
- _____. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pendit, S Nyoman, 2002. Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana, Cetakan Ketujuh Edisi Terbaru dengan Perbaikan-Perbaikan. Pradnya Paramita. Jakarta
- Pitana, I Gde & I Ketut Surya Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi.
- Rahman, dkk. 2011. Actuating dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Lampung: Universitas Negeri Lampung
- Sagala, Syaiful. 2006, Administrasi Pendidikan Kontemporer : Alfabeta. Bandung
- Sedarmayanti, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Refika Aditama, Bandung
- Siagian, Sondang P, 2006, Organisasi Kepemimpinan Dan Prilaku Administrasi, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Spillane, J. James 2004. Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan. Jakarta
- Sudjana, D., 2000. Manajemen program pendidikan untuk pendidikan luar sekolah. Falah Production. Bandung
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung
- _____. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D: Alfabeta. Bandung
- Sukarna. 2011. Dasar-dasar Manajemen. Mandar Maju. Bandung
- Sutarno. 2004. Perpustakaan dan masyarakat. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media. Jakarta

Syafii Inu Kencana. 2003. Birokrasi Pemerintahan Indonesia, Mandar maju, Bandung

The Liang Gie. 2000. Administrasi perkantoran.Modern Liberty. Yogyakarta

Ubert Silalahi. 2009. Studi Tentang Ilmu administrasi, Konsep, Teori an Dimensi, Sinar Baru, Bandung

Ubben, G. C. & Hughes, L. W. 1987. The principal: creative leadership for affective schools. Wells Avenue, NM: Allyn and Bacon

Yoeti, Oka. A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Angkasa. Bandung

_____, 2002. Perencanaan Strategi Pemasaran Daerah Tujuan Wisata. Pradnya Paramita. Jakarta

Qalyubi, Syihabuddin dkk. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Fakultas Adap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. UNDANG – UNDANG/ PERATURAN/ JURNAL

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten Kota

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Siak

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 2016-2021

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2019

- Kusworo, Hendri A. dan Janianton Damanik. 2002. "Pengembangan SDM Pariwisata: Agenda Kebijakan untuk Pembuat Kebijakan". Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 6, No. 1, 105-120
- Nadhiroh, S. A. (2010). Pengaruh Kompleksitas Tugas, Orientasi Tujuan, Dan Self Efficacy Terhadap Kinerja Auditor Dalam Pembuatan Audit Judgment (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Semarang). Universitas Diponegoro. Semarang
- Sella Rizky Asilya, dkk. 2018. Analisis Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata Karimunjawa. Jurnal Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Fridolin Wisora Balida. 2017. Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Menjaga Eksistensi Nilaiebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT
- Agahari Abadi Sianipar, dkk. 2015. Analisis Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Putu Dewi Suryantari, dkk. 2016. Kinerja Dinas Pariwisata Bali Berdasarkan Konsep Value For Money. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.2. November (2016): 1635-1666. ISSN: 2302-8556
- Reka Fajar P.S, dkk, 2018. Kinerja Sumberdaya Manusia Dalam Pengelolaan Objek Pariwisata di Tawangmangu. Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Slamet Riyadi Surakarta SIRPA 201
- Teguh Budi Prasetya, dkk. 2015. Evaluasi Kinerja Pengelolaan Obyek Wisata Pantai di DIY Jurnal Maksipreneur, Vol.V, No. 1, Desember 2015 Hal. 134 – 159
- Retno Pinoke. 2018. Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Punten di Desa Minanga Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi
- Indah Permatasari, dkk 2017. Analisis Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Jurnal Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Firmansyah, dkk. 2018. Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Dugong Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

A.A. Sagung Ayu Srikandi Putri. 2012. Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung A. Jurnal Forum Manajemen, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2012



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau